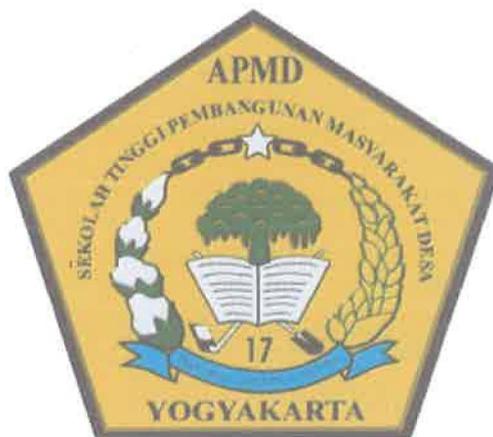


**GOVERNABILITY PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA KALURAHAN KEPUIHARJO, KAPANEWON
CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

YOHANA AYU ROSARI

20520037

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA (S1)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2024



HALAMAN JUDUL
GOVERNABILITY PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA KALURAHAN KEPUHARJO, KAPANEWON
CANGKRINGAN, KABUPATEN SLEMAN

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh :

YOHANA AYU ROSARI

20520037

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

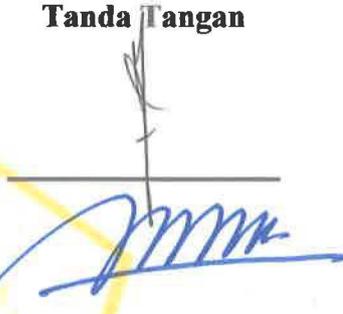
Hari : Rabu

Tanggal : 22 Mei 2024

Waktu : 10.30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si</u> Ketua/Pembimbing	
<u>Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping I	
<u>Minardi, S.IP., M.Sc</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Rijel Samudra, S.Sos, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yohana Ayu Rosari

Nim : 20520037

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Governability* Pemerintahan Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo Kabupaten Sleman” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Mei 2024

Penulis



Yohana Ayu Rosari

20520037

MOTTO

“Tidur Bermimpi Bangun Tidur Raih Mimpi”

“Aku Tahu, Bahwa Engkau Sanggup Melakukan Segala Sesuatu Dan Tidak Ada
Rencana Mu Yang Gagal”

(Ayub 42:2)

Apapun Juga Yang Kamu Perbuat, Perbuatlah Dengan Segenap Hatimu Seperti
Untuk Tuhan Dan Bukan Untuk Manusia”

(Kolose 3:23)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga satu tanggung jawab telah terselesaikan. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan duka dan pengorbanan sangat luar biasa yang terbingkai dari cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Papa saya Alm. Tibursius Hang, terimakasih yang tiada terkira peluk jauh yang selalu memberikan dukungan, semangat dari saya kecil yang punya cita-cita untuk bisa kuliah di jogja. Sekarang Ayu Sudah menyelesaikan skripsi, doakan Ayu terus dari surga pa.
2. Kepada kedua orang tua saya papa sambung saya Selpanus dan mama saya Tasiana Ayang tanpa kalian Ayu tidak bisa seperti sekarang ini, terimakasih yang tiada terkira dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang selalu memberikan Doa dan dukungan tiada henti selama mengerjakan skripsi dan membiayai kuliah sampai sampai saat ini, tanpa Doa dan usaha kalian Ayu tidak bisa sampai di tahap ini.
3. Terimakasih kepada Ibu Dra.B. Hari Saptaning Tyas, M.Si. yang telah membimbing saya dengan sabar dan penuh ketelitian, serta mau memberikan pemahaman kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
4. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya Rosmaida Manurung, Rosaria Oktaviani, Litansia Yonika, Indra Gunawan, Raymondus Jeans, Trifina Ratu Rita, Klara Tiwi Tisnawati, Heribertus Demon, telah berteman baik

dengan saya serta selalu memberi dukungan dan kadang menemani penelitian ke Desa, terimakasih sudah mendengar keluh kelah selama ini serta memberi arahan, bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada kakak-kakak saya Lisa Ramita, Regina Monika, Anci, Aprilianus Deni, Romanus Pradista, Agustro zekius, Dian Rusnawati, yang selalu memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah saya selama mmengerjakan skripsi.
6. Terimakasih kepada Partner saya Fery Markus selalu memberikan dukungan dan Doa, dan mendengarkan keluh kesah saya setiap hari selama mengerjakan skripsi. Selalu mengerti mood saya kalau lagi pusing skripsi.
7. Terimakasih kepada Lurah Kepuharjo Bapak Heri Suprpto dan seluruh Perangkat/Pamong Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, yang telah memberikan kemudahan dan mengizinkan dalam proses pengambilan data untuk penulisan skripsi ini. Dan saya minta maaf mungkin selama melakukan penelitian sikap, tingkah laku dan juga kata-kata saya yang tidak mengenakan untuk Bapak/Ibu di Kalurahan Kepuharjo.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan pertolongan-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi berjudul *Governability* Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, arahan, dan doa dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses pengerjaan skripsi ini :

1. Kepada yang tersayang papa saya Alm. Tibursius Hang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah mengasuh dan mendidik penulis dari kecil sampai sekarang, meskipun sudah berbeda alam tetapi papa selalu mendoakan Ayu dari surga supaya diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada yang tersayang papa sambung saya Selpanus dan mama saya Tasiana Ayang yang telah mengasuh dan mendidik saya, serta membiayai saya selama kuliah hingga bisa sampai di tahap ini dan selalu memberikan dukungan serta Doa yang tiada henti. Tanpa kalian Ayu tidak bisa seperti sekarang ini berkat motivasi kalian Ayu bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.

4. Terimakasih kepada Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
5. Terimakasih kepada Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta.
6. Terimakasih kepada Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si telah memberikan pengarahan, motivasi, dukungan selama proses skripsi ini.
7. Terimakasih kepada bapak dan ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menumpuh studi.
8. Pemerintah Desa dan masyarakat Kalurahan Kepuharjo yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian
9. Untuk semua sahabat dan teman-teman yang selalu membantu serta mendukung penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman penulis di masa mendatang dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca. Penulis berharap agar skripsi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah.

Yogyakarta, 22 Mei.2024

Penulis



Yohana Ayu Rosari

20520037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	III
MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIII
DAFTAR GAMBAR	XIV
DAFTAR BAGAN	XV
INTISARI.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	9
a. Manfaat Akademis	9

b. Manfaat Praktis	9
F. Literature Review	10
G. Kerangka Konseptual	18
a. Governability	18
b. Pemerintah Desa	25
c. Objek Wisata.....	27
H. Metode Penelitian	28
a. Jenis Penelitian.....	28
b. Unit Analisis	29
c. Teknik Pengumpulan Data.....	31
d. Teknik Analisis Data	37
 BAB II PROFIL KALURAHAN KEPUHARJO DAN GAMBARAN UMUM	
OBJEK WISATA.....	41
A. Sejarah Kalurahan Kepuharjo	41
B. Visi-Misi Kalurahan Kepuharjo	42
C. Kondisi Geografis Kalurahan Kepuharjo.....	44
D. Kondisi Demografi Kalurahan Kepuharjo	51
E. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi.....	59
F. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Kepuharjo	68

G. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Kepuharjo	73
H. APBKal Kalurahan Kepuharjo.....	76
I. Gambaran Potensi Objek Wisata Kalurahan Kepuharjo	77
BAB III KAPASITAS PEMERINTAH KALURAHAN KEPUHARJO DALAM	
MENGELOLA SUMBER DAYA ALAM	88
A. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Kepuharjo Dalam Mengelola Sumber Objek Wisata.....	89
B. Otoritas Pemerintah Kalurahan Kepuharjo Dalam Mengelola Objek Wisata	99
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Di Kalurahan Kepuharjo	106
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Informan	31
Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Padukuhan, RW/RT Kalurahan Kepuharjo	46
Tabel 2. 2 Data Luas Wilayah Kalurahan Kepuharjo Per Padukuhan	49
Tabel 2. 3 Kelompok Usia Penduduk Kalurahan Kepuharjo	52
Tabel 2. 4 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	54
Tabel 2. 5 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Kepuharjo.....	56
Tabel 2. 6 Data Penduduk Menurut Agama.....	58
Tabel 2. 7 Kegiatan Sosial Dan Budaya.....	62
Tabel 2. 8 Jenis Peternakan Kalurahan Kepuharjo	66
Tabel 2. 9 Menurut Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	67
Tabel 2. 10 Fasilitas Kesehatan Kalurahan Kepuharjo	69
Tabel 2. 11 Fasilitas Peribadatan di Kalurahan Kepuharjo.....	70
Tabel 2. 12 Fasilitas Pendidikan Kalurahan Kepuharjo.....	72
Tabel 2. 13 APBKal Kalurahan Kepuharjo Tahun 2024	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Kepuharjo	48
Gambar 2. 2 Merapi Golf Gelanggang Wisata.....	79
Gambar 2. 3 Bangker Kaliadem.....	80
Gambar 2. 4 Bukit Triangulasi.....	81
Gambar 2. 5 Stonehenge	82
Gambar 2. 6 The Lost World Castle	82
Gambar 2. 7 Batu alien.....	83
Gambar 2. 8 Rumah hobit	84
Gambar 2. 9 Musium Memori Omahku.....	85
Gambar 2. 10 Museum Merapi Sisa Hartaku.....	86
Gambar 3. 1 Bunker Kaliadem Potensi Objek Wisata Kalurahan Kepuharjo.....	107

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kepuharjo.....	74
--	----

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Governability* Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti kapasitas melihat dari segi kapasitas Pemerintah Kalurahan, otoritas Pemerintah Kalurahan serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo. Jika dilihat potensi yang dimiliki Kalurahan Kepuharjo mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan potensi yang dapat dikembangkan untuk pengelolaan sumber daya alam seperti berdirinya beberapa objek wisata yang masyarakat bangun dan mengelola supaya adanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada perspektif *Governability* untuk melihat bagaimana kapasitas, otoritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo supaya bisa membantu ekonomi masyarakat lokal.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan Tahap Reduksi Data, Tahap Penyajian Data, penarik kesimpulan. Tahap penyajian data Tahap Verifikasi Data Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk tabel dan narasi atau dalam bentuk catatan yang diperoleh di lapangan atau dari literatur penelitian yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Governability* pemanfaatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo adalah membantu ekonomi masyarakat yang sempat mengalami penurunan karena erupsi merapi pada Tahun 2010, dengan adanya mengembangkan potensi yang ada disana seperti adanya pemanfaatan sumber daya alam ini sangat membantu perekonomian masyarakat.

Jika dilihat dari kapasitas nya Pemerintah Kalurahan Kepuharjo belum ada kolaborasi yang benar-benar terjalin karena memang pada awal terbentuknya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di Kepuharjo tidak melibatkan pihak manapun murni dari inisiatif masyarakat. Dari segi otoritas juga belum memadai karena belum memiliki izin dari Pemda Sleman sehingga kolaborasi dari stekholder terkait belum ada karena kolaborasi dari pihak-pihak terkait itu sangat penting. Dalam hal ini tentu Pemerintah Kalurahan Kepuharjo tetap harus memproses izin supaya menemukan titik terang karena pihak Pemda Sleman sudah berkunjung kesan namun hanya meminta pajak, jadi supaya tidak ada tumpang tindih antara pemangku kepentingan.

Kata Kunci : *Governability*, kapasitas, Sumber Daya Alam, otoritas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bentuk aspek sehingga diperlukan perlindungan atau diberdayakan agar menjadi desa yang mandiri, kuat dan demokratis sehingga bisa menciptakan suatu landasan yang kuat baik dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan agar menuju masyarakat yang makmur, adil serta sejahtera. Spirit ini muncul dan dapat dikaji dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa desa diletakan sebagai aktor pada hakekatnya dengan kewenangan yang bersifat lokal atau subsidiaritas sehingga dapat memberikan ruang kepada desa untuk tumbuh dengan diri mereka sendiri melalui prakarsa masyarakat dan pemerintah desa setempat. Desa tumbuh berdasarkan dinamika norma, budaya, adat, keyakinan, dan agama sebagai sumber pengetahuan. Desa dapat mengendalikan harmoni kehidupan karena merupakan penyatuan komunitas yang terpaut dengan nilai-nilai adat setempat. Selain itu, desa mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi sosial, dan adat istiadat setempat serta desa tidak lagi dianggap sebagai penegak kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di atasnya.

Desa memiliki sumber daya yang melimpah dengan memanfaatkan kewenangan desa, untuk bisa mensejahterakan masyarakat desa oleh karena itu pengelolaan sumber daya dikatakan baik jika mampu mengangkat perekonomian supaya tingkat kemiskinan di desa bisa teratasi untuk menunjang

keberlanjutan kesejahteraan masyarakat setempat. Dampak pengelolaan yang baik juga sangat memberikan impact berupa kemajuan pada sektor ekonomi sebagai sumber pendapatan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan baik bagi pemerintah maupun masyarakat secara khusus.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang umat manusia dan kemajuan bangsa (Iswandi dan Dewata, 2020). Beragam sumber daya alam memberikan dasar untuk mendapatkan energi, air, makanan, dan kapasitas untuk mempertahankan sistem kehidupan. Keberhasilan pembangunan bergantung pada implementasi dan efektivitas kebijakan sumber daya alam dan lingkungan, yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memastikan kualitas lingkungan. Sumber daya alam memiliki kualitas yang melekat yang membuatnya beragam dalam hal geografis, temporal, kuantitatif, dan kualitatif. Harus ada kesepakatan penuh antara pemanfaatan sumber daya alam dan operasi ekosistem. Mempertimbangkan saling ketergantungan ekologis sangat penting untuk mencapai efisiensi ekonomi dalam pengaturan ini, karena hal ini membantu mengurangi kerugian dalam pembangunan dan mempromosikan kelangsungan hidup jangka panjang ekosistem.

Pemerintah desa tentu menginginkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi warganya dengan menggunakan sumber daya alam yang tersedia di masyarakat. Dari hasil banyaknya wisata yang berkunjung ke objek-objek wisata yang sudah ada

disana dari situlah hasil yang dapat diambil oleh masyarakat lokal untuk menunjang ekonomi.

Kalurahan Kepuharjo, terletak di lereng Gunung Merapi, terkenal akan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, Kalurahan Kepuharjo menampilkan kelimpahan sumber daya alam yang dapat dikembangkan, terutama dalam konteks potensi wisata alam di kawasan desa yang berada di kaki Gunung Merapi. Dengan view Gunung Merapi sendiri merupakan destinasi daya tarik tersendiri bagi pengunjung wisata. Dengan pemandangan alam yang spektakuler, suhu udara yang sejuk, dan udara yang segar, Lereng Merapi menjadi tempat yang istimewa bagi para penggemar alam dan petualang. Terdapat berbagai destinasi alam menarik di Lereng Merapi yang sepatutnya dijelajahi.

Sumber Daya Alam yang ada di Kalurahan Kepuharjo yaitu, pertama objek wisata di lereng merapi yaitu objek wisata Bunker Kaliadem, wisata Lava Merapi dan Batu Alien, wisata The Lost World Castle, wisata Stonehenge, wisata kali gendol, wisata museum mini sisa hartaku, wisata kopi Merapi, wisata rumah Hobbit, Desa wisata Petung, objek wisata ini masih beroperasi sampai saat ini. Kalurahan kepuharjo selain memiliki potensi wisata untuk menunjang perekonomian, disana juga sumber daya alam lain seperti di bidang peternakan yaitu sapi. Hasil dari sumber daya alam ini tentunya juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelum erupsi banyak warga masyarakat yang merantau tapi setelah pasca erupsi sekarang sudah

jarang masyarakat yang merantau karena sudah tersedia lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal sehingga banyak juga masyarakat luar yang masuk ke kepuharjo untuk bekerja. Selain dari hasil objek wisata, namun adapun permasalahan yang sampai saat ini belum ada jalan keluar atau titik terang dimana Pemerintah daerah Sleman belum memberikan izin untuk objek wisata dikarenakan berada di kawasan lereng merapi dan rawan bencana.

Berdasarkan wawancara dengan Lurah Kepuharjo beliau mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Sleman sampai saat ini belum ada keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kepuharjo karena Pemerintah Daerah Sleman belum memberikan izin karena berada pada Lereng Merapi dan Rawan bencana, serta setelah pasca erupsi 2010 Pemerintah beranggapan bahwa banyak memakan korban tapi pada kenyataan korban hanya empat orang dan itu juga ada yang termasuk sudah lama sakit seperti stroke. Sampai saat ini untuk pembangunan wisata disana baik dari jalan, air, dan listrik itu dari masyarakat sendiri. Beliau juga mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman itu belum diajuin oleh Pemerintah Kalurahan Kepuharjo tentang pemanfaatan sumber daya alam ini, karena itu bukan merupakan tanah kas itu adalah tanah pribadi. Sejauh ini Lurah mengatakan Pemerintah Desa hanya mengusulkan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengajukan ijin ke pemerintah Daerah Sleman. Akan tetapi karena Peraturan Presiden No.70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang dimana kawasan ini adalah kawasan lindung dan kawasan budi daya sekitar di sekitar Taman Nasional Gunung Merapi dan kesejahteraan

masyarakat di kawasan sekitar yang merupakan Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi. Berkaitan dengan Pergub RT RW pasal 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Karena kawasan rawan bencana tiga itu dalam Pergub tidak boleh membangun secara permanen, akan tetapi masyarakat disana mengartikan bahwa yang tidak boleh itu hanya di pakai untuk hunian kalau untuk wisata dan ekonomi sepengetahuan masyarakat disana tetap boleh maka dari itu untuk sementara ini kegiatan disana belum ada di dukung oleh Pemda Sleman. Demikian sekarang Pemda Sleman lewat dinas terkait sudah datang kesana hanya untuk meminta pajak untuk masuk kawasan wisata maupun parkir kendaraan. Pajak yang diminta dari pemda untuk kendaraan yaitu 20%, sedangkan pajak wisata 60% untuk pemda, 40% untuk masyarakat. Berdasarkan wawancara Pak Bowo selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa, ternyata tidak semua masyarakat merasakan dampak dari hasil dari wisata karena tidak semua Dusun mempunyai wisata jadi disana belum bisa dikatakan sejahtera dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan dari hasil yang tidak semua masyarakat merasakan.

Pemahaman tentang kapasitas dalam lingkup lembaga pemerintah sering kali berfokus pada tiga elemen kunci: organisasi sebagai wadah atau proses, sumber daya manusia, serta sistem dan prosedur. Ketiga komponen ini ditangani secara bersamaan dan sering kali dilihat sebagai sebuah institusi. Menurut Setiabudi dkk (2018), terdapat dua jenis kapasitas yaitu kapasitas tersedia dan kapasitas yang dibutuhkan. Kapasitas tersedia merupakan kapasitas sistem yang tersedia guna memproduksi jumlah volume output

tertentu dalam periode waktu tertentu. Sedangkan kapasitas yang dibutuhkan merupakan kapasitas sistem yang dibutuhkan oleh bagian produksi guna memproduksi capaian jumlah volume output tertentu dalam periode waktu tertentu. Kapasitas mengacu pada kemampuan pemerintah untuk secara efektif menjalankan tugas-tugas politik seperti pembuatan kebijakan, legitimasi, otonomi, dan distribusi kekuasaan, serta kegiatan ekonomi termasuk pemerataan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Selain itu, kapasitas juga mencakup aspek-aspek administratif seperti pelaksanaan kebijakan dan berfungsinya sistem. Pemerintah dianggap gagal ketika kebijakan dan peraturan yang dibuatnya tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Kapasitas dari pemerintah Desa, harus memiliki kemampuan atau kapasitas yang memadai, oleh karena itu pemerintah desa khususnya pada pemerintah Desa Kepuharjo harus memiliki kapasitas yang memumpuni dalam pengelolaan sumber daya alam yang belum memiliki izin dari Pemerintah Sleman dan seharusnya Pemerintah Kalurahan yang mengajukan atas aspirasi dari masyarakat dan juga memberikan panduan kepada masyarakat bukan hanya mengusulkan dan membuat masyarakat berjalan sendiri terkait dalam pengurusan mengurus izin kepada Pemerintah Sleman sehingga terjadi kesenjangan, antara masyarakat dan Pemerintah Desa setempat dalam menangani masalah ini. Karena Pemerintah Desa merupakan wadah untuk menampung aspirasi serta memfasilitasi masyarakat baik dalam melindungi. Jika dipahami seperti itu agar kapasitas pemerintah Desa Kepuharjo dalam

pengelolaan sumber daya alam harus terselenggara dengan baik kedepannya. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Kepuharjo saat ini belum mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan efektif.

Dalam penelitian ini mendorong saya ingin meneliti mendalam lagi melihat dari sisi Pemerintahan menggunakan perspektif Govenability karena, berdasarkan hasil dilakukannya wawancara dengan Lurah selaku penanggung jawab disana, beliau mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam disana dilakukan secara mandiri semua oleh masyarakat setempat, tanpa melibatkan pihak Pemerintah Sleman karena belum mendapatkan izin. Namun dalam Governability yaitu kita melihat kapasitas dari berbagai pihak termasuk masyarakat, pemerintahan Kepuharjo, dan Pemerintah Sleman supaya bisa berkolaborasi dan semua masyarakat merasakan hasil dari potensi tersebut serta bisa mendapatkan izin.

Secara umum, pengelolaan sumber daya alam bisa mencapai tingkat optimal jika kapasitas atau kemampuan dari Pemerintah Desa Kepuharjo bisa mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah Sleman atas aspirasi dari masyarakat setempat serta mencari solusi untuk kedepannya supaya tidak ada tumpang tindih dari pihak-pihak terkait. Dalam kerangka kemitraan, fungsi pemerintah desa adalah memberikan dukungan, memfasilitasi, melindungi, dan memberikan panduan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat optimal dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Karena itu, dengan penjelasan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk menggali lebih dalam berkaitan dengan penerapan Governabilitas seperti kapasitas dan otoritas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo. Maka dari itu penelitian yang berjudul “Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan diatas, Governability Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata jarang ditemukan atau digunakan oleh Desa atau Kalurahan lainnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Governability Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam pengembangan objek wisata. Maka dari itu, peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut; bagaimana Governability Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

C. Fokus Penelitian

- a. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mengelola objek wisata
- b. Otoritas Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mengelola objek wisata
- c. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan objek wisata di Kalurahan Kepuharjo

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memberikan gambaran tentang arah penelitian. Tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yaitu untuk mendeskripsikan

1. Governability atau kapasitas Pemerintah Kalurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo.
2. Otoritas dari Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan objek wisata di Kalurahan Kepuharjo

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dalam rangka memajukan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam konteks Sistem Pemerintahan Desa, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan, gagasan dan kolaborasi dalam pemerintahan desa, khususnya dalam kaitannya dengan peran dan kegiatan mereka. Gambaran ini berfungsi untuk memfasilitasi pemahaman tentang upaya Pemerintah Desa dalam lingkungan pedesaan, menjadikannya topik pembicaraan yang berharga bagi para mahasiswa dan pengkaji Sistem Pemerintahan Desa.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi peneliti yaitu, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan umum tentang dimensi kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah otonom dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam dalam konstruksi wacana Governability serta mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kalurahan.guna menyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan hajat hidup orang banyak.

F. Literature Review

Pada penelitian ini, penulis akan menggambarkan beberapa peneliti yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata dalam meningkatkan kesejahteraan.

1. Penelitian diambil dari jurnal Ilmu Politik, Pemerintah dan Administrasi Publik Volume 7 Nomor 1 Tahun 2024. Yang berjudul Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Ditulis oleh Agustina Setiawan, Widuri Wulandari, Siti Munawaroh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pemerintah desa dalam pembangunan desa wisata di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan permasalahannya Desa Cimanggu mempunyai potensi wisata salah satunya sumber air panas. Namun, potensi ini belum dikembangkan secara optimal. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa Cimanggu dalam pengembangan desa wisata belum maksimal berjalan secara optimal.
2. Penelitian diambil dari jurnal Administrasi Pemerintah Desa Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022. Yang berjudul Governabilitas Peran Pemerintah Desa Girikarto Dalam Pengembangan Wisata Heha Ocean View. Ditulis oleh Musmulyadi, Yuli Setyowati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa Girikarto dalam pengembangan wisata Heha yang berada Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan permasalahannya tidak adanya pelatihan

dan pendampingan terkait kepariwisataan serta menjalin kemitraan yang berorientasi pada pemenuhan sumber daya produktif untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata peran pemerintah desa dalam mengelola kawasan wisata diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap masyarakat Desa Girikarto. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pengembangan obyek wisata dalam beberapa obyek wisata sudah mengalami peningkatan contohnya pantai Kerakal namun perlu ditingkat lagi, dan obyek wisata lain seperti Goa Pindul, Air Terjun Sri gethuk dan pantai indra yang masih perlu perhatian yang lebih untuk menunjang kegiatan pariwisata ditempat tersebut.

3. Penelitian diambil dari jurnal Ilmu Pemerintah Volume 4 Nomor 6 Tahun 2020. Yang berjudul Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya Di Kabupaten Ciamis. Ditulis oleh Ari Kusumah Wardani, Slamet Riyadi. Penelitian ini bertujuan mengetahui sejauh mana peran dari Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan potensi dan obyek wisata. Sedangkan permasalahannya dimana masih banyak masyarakat perdesaan yang tergolong pra sejahtera. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Desa cukup berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata budaya. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya kelompok masyarakat yang mengusung konsep *Community Based Tourism (CBT)* dan *Smart Tourism*

yang ditandai dengan banyaknya sosial media yang mempromosikan destinasi wisata di Kabupaten Ciamis.

4. Penelitian diambil dari jurnal Politik dan Pemerintah Daerah Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020. Yang berjudul Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut Di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditulis oleh Polikarpus Dore Beda, Supardal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan desa wisata Srikeminut dan kendala-kendala yang di hadapi dalam pengelolaannya di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan permasalahannya belum ada penataan soal lahan parkir, kurangnya pelatihan atau pendampingan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah dalam proses pengelolaan desa wisata ada dua faktor penting yang perlu di lakukan yaitu: pengembangan dan kelembagaan. Pengembangan terdiri dari perencanaan, dalam proses perencanaan terlihat sedikit elitis dan perencanaannya tanpa ada pertimbangan terhadap antisipasi bencana alam. Pelaksanaan, dari sisi fasilitas baik sarana dan prasarana penunjang kelancaran aktivitas di tempat wisata masih kurang, misalnya soal jalan dan jaringan internet. Masih kurangnya koordinasi antara semua elemen yang terlibat dalam pengelolaan baik pengelola, pokdarwis, pemerintah desa dan masyarakat. Pembiayaan, masyarakat sudah mendapatkan manfaat dengan adanya penghasilan dari desa wisata namun masih belum ada regulasi khusus yang mengatur soal pembagian hasil.

5. Penelitian diambil dari jurnal Pengembangan Kota Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016. Yang berjudul Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa wisata. Ditulis oleh Gita Ratri Prafitri, Maya Damayanti. Tujuan penelitian untuk mengetahui kapasitas organisasi dan kapasitas individu pengelola Desa Wisata Ketenger. Sedangkan permasalahannya pada aspek kepemimpinan dan koordinasi, Pokdarwis “*Ketenger Adventure*” menunjukkan kapasitas yang kurang baik. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tingkat organisasi, organisasi telah menunjukkan kapasitas yang baik dalam aspek kemitraan eksternal, aspek pengembangan potensi wisata, serta aspek promosi desa wisata.
6. Penelitian ini diambil dari jurnal Penelitian Sosial dan Politik Volume 8 Nomor 1 Tahun 2019. Yang berjudul Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa. Ditulis oleh Okparizan, Asep Sumaryana, Didin Muhafidin, Yogi Suprayogi Sugandi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana mewujudkan kapasitas organisasi desa yang efektif. Sedangkan permasalahannya Kinerja organisasi desa belum optimal dalam memaksimalkan potensi desa wisata. Metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian membuktikan bahwa dimensi kapasitas organisasi cenderung tidak memberikan manfaat yang lebih besar dalam pembangunan di desa wisata. Keseluruhan dimensi kapasitas yang dinilai tidak menunjukkan dukungan kapasitas kerja yang efektif.
7. Penelitian diambil dari jurnal *Social and Government* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2022. Yang berjudul Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata

Gerbang Banyu Langit di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. Ditulis oleh Besti Kusumawati, Tri Nugroho. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata Gerbang Banyu Langit di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. Sedangkan permasalahannya keterbatasan sumber daya manusia, dana yang tidak mencukupi, dan minimnya regulasi yang dijadikan acuan. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata Gerbang Banyu Langit di Srimulyo efektif karena: 1) Bina manusia, desa Srimulyo mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia; 2) Bina usaha, dilakukan dengan pemasaran melalui administrasi digital yang melibatkan komunitas dan lembaga di atasnya; 3) Bina lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Srimulyo dengan meningkatkan potensi lingkungan, melaksanakan visi desa, pelaksanaan sapta pesona; 4) Bina lembaga yang dilakukan oleh perangkat desa Srimulyo dengan mengimplementasikan visi organisasi yaitu menyadarkan masyarakat tentang pariwisata. Namun, menemui beberapa kendala: 1) terbatasnya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia; 2) bina usaha kurang sempurna karena pemasarannya kurang luas; 3) fasilitas pariwisata yang kurang memadai; 4) desa belum memiliki peraturan tentang pengelolaan pariwisata.

8. Penelitian Simplisius Alberto Padji (2022) yang berjudul “*Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Sumber Daya Alam*”. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas Pemerintah Kalurahan

Umbulharjo memiliki keabsahan (legitimasi) yang dihubungkan dengan hukum. Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di Kalurahan Umbulharjo sekaligus menuntut adanya kepatuhan dan ketaatan. Sementara itu, kapasitas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam pengelolaan sumber daya alam yaitu: Pertama, kapasitas responsif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang dijadikan sebagai basis dan kebijakan pembangunan kalurahan yaitu potensi wisata potensi wisata dan distribusi air bersih. Kedua, kapasitas ekstraksi.

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset kalurahan. Hal terkait dengan identifikasi potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo. Ketiga, kapasitas regulasi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu membuat peraturan tentang potensi wisata dan kebijakan terkait biaya sewa air bersih. Keempat, kapasitas distributif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mendistribusikan air secara adil dan merata. Kelima, kapasitas ekstraksi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo melakukan pengembangan jaringan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mendukung dan mengelola potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo.

9. Penelitian Leonaldo Paskal (2024) yang berjudul “*Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Objek Wisata*”. Hasil penelitian Pertama, Pemerintah Desa Kebong belum memiliki Kapasitas, dikarenakan dalam Pemanfaatan Objek Wisata di Desa Kebong, adalah milik perorangan dan juga dikelola oleh

koperasi. Pemerintah desa hanya sebagai pendukung masyarakat dalam pemanfaatan objek wisata dengan memberikan surat izin usaha, melaksanakan pelatihan dan penyuluhan serta melaksanakan seminar bagi masyarakat yang memiliki usaha pada bidang pariwisata. Kedua, Otoritas dalam Pemanfaatan Objek Wisata, Pemerintah Desa Kebong memiliki Otoritas dalam Perencanaan, namun tidak memiliki Otoritas dalam Pelaksanaan. Karena otoritas tersebut dimiliki oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan yang sah, mengatur dan memerintah Desa.

10. Penelitian Nessi Marceta (2022) yang berjudul "*Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta belum berjalan efektif, dengan alasan karena pemerintah desa dalam regulasi objek wisata Tebing Breksi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemerintah desa dalam ekstraktif objek wisata Tebing Breksi dengan mengembangkan SDM dan SDA. Dan pemerintah desa dalam distributif belum adil dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa belum terpenuhi kebutuhan sehingga belum meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kalurahan dalam politik sudah bisa berjalan cukup baik, alasannya dalam membuat perencanaan kebijakan untuk bekerjasama sudah sesuai dengan apa yang dibuat di RPJMKal Sambirejo.

Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang Penelitian terdahulu yang telah dikaji memiliki fokus yang beragam terkait pengelolaan desa wisata dan kapasitas pemerintah desa dalam berbagai konteks dan lokasi. Misalnya, penelitian oleh Setiawan et al. (2024) mengkaji kapasitas pemerintah Desa Cimanggu dalam mengembangkan potensi wisata sumber air panas. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata belum berjalan optimal karena keterbatasan dalam implementasi potensi wisata yang ada. Sementara itu, Musmulyadi dan Setyowati (2022) meneliti governabilitas pemerintah Desa Girikarto dalam pengembangan wisata Heha Ocean View, yang menunjukkan perlunya pelatihan dan kemitraan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata. Penelitian lain, seperti oleh Kusumah Wardani dan Riyadi (2020), fokus pada peran aktif pemerintah desa dalam pengembangan wisata budaya di Kabupaten Ciamis, dengan temuan bahwa konsep Community Based Tourism (CBT) dan Smart Tourism mulai muncul, namun masih terdapat banyak masyarakat yang tergolong pra sejahtera.

Penelitian yang dilakukan saat ini berfokus pada governabilitas Pemerintah Desa dalam pemanfaatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak menyoroti kapasitas dan peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana Pemerintah Desa Kepuharjo berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam di kawasan yang rentan bencana. Penelitian ini menekankan pada analisis

kapasitas dan otoritas pemerintah desa dalam konteks hukum dan kebijakan, serta bagaimana mereka dapat mengatasi kendala birokrasi dan regulasi untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan governabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Serta dalam melihat permasalahan yang terjadi tentunya menggunakan prespektif yang berbeda dalam penelitian ini menggunakan prespektif 5G yaitu *Governability* yang dimana dalam pelaksanaannya prespektif ini sendiri memiliki sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian *Governability* Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam melibatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat.

G. Kerangka Konseptual

a. Governability

Governability menurut Sutoro Eko mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan. Dalam hal ini *Governabilitas* berbicara dalam 2 aspek yaitu, otoritas serta kapasitas. *Governabilitas* (otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah) adalah jantung *government making*. Kekuasaan menjadi pintu masuk pembicaraan. Pemegang kekuasaan bisa saja berhenti dengan ruling atau mempertahankan kekuasaan, bisa juga menggunakan kekuasaan untuk *leading*, atau menggunakan otoritas secara rutin untuk menyelenggarakan negara (*ordering the state*) semata. Kekuasaan bisa membentuk *government making* ketika struktur-institusi bekerja secara dinamis melakukan *transforming the state* melalui pelebagaan *governabilitas*. Ini terlihat dari bagaimana fungsi-fungsi utama

pemerintah melembaga dalam legislasi dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah-parlemen, sekaligus bekerjanya otoritas memaksa (koersi) terhadap negara, warga, dan masyarakat. Pelembagaan governabilitas melakukan kanalisasi hak dan kepentingan beragam subjek, sekaligus melakukan limitasi kekuasaan politik, sehingga mengarahkannya menjadi otoritas, kekuatan, kapasitas, kewajiban (reponsibilitas) dan tanggungjawab (akuntabilitas).

Governabilitas bersifat interaktif sehingga dibutuhkan governance. Tetapi bukan governance dalam pengertian “governance without government” maupun good governance. Dua mantra ini bersifat normatif yang hendak “melubangi pemerintah negara”, dan secara keilmuan tidak sanggup memberi daya interpretasi dan ekplanasi terhadap praktik pemerintahan. Karena itulah, Giliberto Capano, Michael Howlett dan M Ramesh (2005) menyerukan “bringing government back in” untuk merespons kegagalan governance. Mereka memiliki argumen kuat untuk mendukung pandangan bahwa pemerintah terus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan, dan bahwa jika fakta ini tidak dipertimbangkan maka persepsi risiko tata kelola (governance) ditambatkan pada pandangan yang normatif atau preskriptif tanpa basis empiris yang memadai.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa governability berkaitan dengan yurisdiksi pemerintah dalam mengelola suatu wilayah, sekaligus mencakup interaksi yang saling berhubungan dan diperlukan antara pemerintah dan masyarakat. Pola ini muncul dari adanya peraturan dan pedoman yang ditetapkan dan disepakati bersama. Peraturan-peraturan ini

bertujuan untuk mengatur semua elemen dalam rangka meningkatkan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam. produktivitas dan efisiensi dalam masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam dan aset-aset yang ada secara efektif, khususnya di tingkat desa. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tata kelola pemerintahan, penting untuk fokus pada dua aspek spesifik: bagaimana kapasitas dan otoritas dari pemerintah desa Kepuharjo dalam pengelolaan sumber daya alam disana yang merujuk pada kewenangan atau peraturan yang dibuat bersama dan dipatuhi bersama dan kemampuan pemerintah Desa untuk keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam kedepannya supaya bisa mensejahterakan masyarakat.

1. Konsep Kapasitas

Kapasitas mengacu pada kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau fungsi tertentu. Menurut Moenir (2002), kata sifat kompeten merupakan asal kata dari kemampuan. Kemampuan mengacu pada kualitas atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk berhasil melakukan suatu pekerjaan atau tugas, yang mengarah pada penciptaan barang atau jasa yang diinginkan. Menurut Morgan (2006), kapasitas mengacu pada berbagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, atau kondisi yang memungkinkan individu, organisasi, jaringan, atau sektor untuk memenuhi fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode waktu tertentu (Alaam dan Prawitno, 2015:95).

Kapasitas, sebagaimana dijelaskan oleh Millen (2004), mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagai secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pemahaman kapasitas dalam lingkup institusi pemerintah pada umumnya menasar pada tiga aspek, yaitu organisasi sebagai wadah maupun proses, sumber daya manusia, dan sistem dan tata laksana. Ketiga aspek tersebut dikelola secara bersamaan dan membentuk satu kesatuan, biasa diartikan sebagai suatu lembaga. Haboddin (2015) mengatakan bahwa perpaduan dari kapasitas teknokratik dan kapasitas politik seorang pemimpin ketika mengelola pemerintahan menghasilkan *governability*. Keahlian, profesionalisme, keterampilan, dan kerja justru wajib disertai kapasitas politik dari seorang pemimpin. Oleh karena itu, kapasitas politik dan kapasitas teknokratik ini membentuk pola *governability* yang kuat. Kedua kapasitas ini sangat penting terutama dalam menyediakan *public goods* ataupun menyelesaikan persoalan-persoalan publik lainnya. Jika keduanya tidak seimbang, maka kapasitas pemerintah juga dipertanyakan.

Kapasitas adalah sebuah konsep dalam administrasi publik yang mengacu pada kompetensi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan kinerja (Rozaki, 2005). Menurut Rozaki (2005), kapasitas pemerintah desa terdiri dari lima kapasitas yaitu:

- a. Kapasitas regulasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola kehidupan desa dan berbagai elemennya secara efektif (seperti

wilayah, kekayaan, dan populasi) melalui penerapan peraturan desa yang selaras dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat;

- b. Kemampuan ekstraksi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mengumpulkan, mengelola, dan memaksimalkan sumber daya desa untuk menegakkan keberlanjutan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Kemampuan distributif adalah kemampuan pemerintah desa untuk mengalokasikan sumber daya desa secara adil dan merata sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa.
- d. Kapasitas responsif mengacu pada kemampuan untuk mengetahui dan bereaksi terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian menjadi dasar dan arahan dalam merumuskan strategi pembangunan desa;
- e. Kapasitas jaringan mengacu pada kemampuan pemerintah desa dan anggota masyarakat untuk membangun dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan pihak lain, untuk memfasilitasi administrasi sumber daya desa yang efisien.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapasitas mengacu pada kemampuan dan kompetensi individu dan organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas-tugasnya dengan baik dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika dilihat dari perspektif ini, kapasitas pemerintah desa mengacu pada kemampuan dan keahliannya dalam mengkoordinasikan, mendampingi, dan memberdayakan masyarakat secara efektif.

2. Konsep Otoritas

Otoritas (authority) sebuah istilah yang sering dipertukarkan dengan istilah kekuasaan (power). Meskipun demikian, Max Weber lebih menyukai istilah otoritas daripada kekuasaan. Menurut Weber, otoritas mengacu pada mematuhi perintah orang lain untuk tujuan tertentu. Bagi Weber, kekuasaan akan kehilangan maknanya jika kekuasaan tidak disertai dengan otoritas. Itulah sebabnya Weber mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai otoritas dapat dipastikan memiliki kekuasaan. Dan yang punya kekuasaan belum tentu punya kekuasaan. Hal ini juga berlaku untuk organisasi seperti negara. Organisasi seperti negara tidak dapat berfungsi tanpa disertai oleh otoritas.

Selain itu, sesuai dengan analisis Weber, otoritas secara inheren bergantung pada legitimasi. Status hukum secara inheren terkait dengan legitimasi. Kredibilitas seorang pemimpin ditunjukkan ketika bawahan mereka memiliki kepercayaan terhadap pernyataan mereka. Individu yang berada dalam posisi kekuasaan memiliki yurisdiksi untuk memberikan perintah dan hak untuk mengharapkan ketaatan (Marbun, 1996: 33). Oleh karena itu, individu yang berada dalam posisi otoritas harus mematuhi persyaratan untuk tunduk.

Definisi sebelumnya menetapkan bahwa otoritas adalah kemampuan untuk memaksa orang lain untuk mematuhi keinginan seseorang. Otoritas diberikan kepada apa pun setelah disahkan atau ditetapkan dengan kuat. Hal ini menyiratkan bahwa mereka yang berada di posisi kekuasaan memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan permintaan dan memastikan kepatuhan.

Kooiman (2010) berpendapat bahwa tata kelola pemerintahan dicontohkan dengan kapasitas untuk menyesuaikan tuntutan pemerintahan dengan kapasitas dan kapasitas dengan persyaratan secara tepat dan efektif. Kooiman percaya bahwa tuntutan melampaui fenomena sosial semata dan kemampuan tersebut lebih dari sekadar demonstrasi kepada pemerintah. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki hubungan yang saling bergantung, di mana mereka bergantung pada kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Hubungan ini melibatkan dinamika dan interaksi, serta pola kompleksitas dan ketergantungan yang rumit. Selain itu, keempat ranah masyarakat memiliki peran dalam hubungan ini (Kooiman, 2010; Kooiman, 2016).

Pierre dan Peters sependapat dengan Kooiman mengenai *governability*. Mereka berpendapat bahwa kemampuan beradaptasi dari institusi politik merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, terutama bagi negara untuk memberikan panduan, signifikansi, dan konsistensi dalam memerintah. Hal ini karena kemampuan memerintah terkait erat dengan tata kelola pemerintahan dan fungsi memerintah. *Governability*, sebagai aspek pelengkap tata kelola pemerintahan, mencakup analisis tidak hanya tentang keberadaan pemerintah dalam suatu masyarakat, tetapi juga dinamika hubungan antara negara dan masyarakat, seperti yang dianjurkan oleh Pierre dan Peters. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga merupakan aspek mendasar dari tata kelola pemerintahan. Peier dan Peters (2005) meneliti topik jaringan, masyarakat sipil, dan regulasi.

Maka dari beberapa pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa governability merupakan terkait tentang otoritas pemerintah untuk memerintah suatu wilayah, namun governability juga dapat dimaknai hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang memiliki pola yang saling membutuhkan dan ketergantungan, pola ini terjadi karena adanya peraturan dan ketentuan yang tetap dan disepakati bersama. Terdapat peraturan yang mengatur dan mengatur segala sesuatu untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi masyarakat serta meningkatkan perekonomian dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya yang tersedia di daerah, khususnya di desa.

b. Pemerintah Desa

Pemerintah desa yaitu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa itu sendiri menunjuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan kepala desa/ desa adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa/desa adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah desa (Nasution, 2020). Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala-kepala urusan yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan layanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa dilapangan. Kepala dusun adalah

wakil kepala desa di wilayahnya. Untuk mengatur, mengurus dan pengurusan urusannya, maka pemerintah desa membuat peraturan desa, peraturan desa dibuat oleh kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Desa Dilaksanakan oleh Kepala Desa dan di pertanggungjawabkan kepada Rakyat melalui BPD (Saputra, 2019).

Dalam rangka memahami konsep pemerintah desa, maka penting untuk mengarahkan perhatian pada konsep pemerintah. Menurut Sutoro Eko (2021), pemerintah (Government) adalah supreme authority dalam arena pemerintahan seperti negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, biokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen. Selain itu, Sutoro Eko (2021) memberikan penjelasan tentang beberapa konotasi yang terkait dengan istilah "pemerintah". Pertama-tama, mari kita bahas pemerintah sebagai subjek. Menurut prinsip idealisme konstitusionaldemokratis, pemerintah dan parlemen, sebagai institusi yang mewakili kedaulatan rakyat, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, realisme mengakui bahwa entitas yang berkuasa tidak selalu merupakan pemerintah resmi. Berbagai entitas, termasuk negara, birokrat, konsultan, teknokrat, dan gadget, secara de facto memegang kekuasaan pemerintahan. Masalah pemerintahan mencakup cita-cita filosofis yang mendalam.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan didukung oleh perangkat desa, bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan dan mewakili kepentingan

masyarakat setempat. Struktur pemerintahan desa mencakup kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala dusun. Kepala desa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan dan menegakkan peraturan desa. Konsep pemerintahan desa ini berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintah desa memegang otoritas yang mewakili rakyat di tingkat lokal. Selain itu, pemahaman tentang pemerintahan juga mencakup berbagai entitas yang berperan dalam pelaksanaan otoritas rakyat, termasuk pemerintah resmi, birokrat, dan institusi lain yang mempengaruhi kebijakan dan administrasi publik.

c. Objek Wisata

Menurut Adisasmita (2010:43) menyatakan bahwa :Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai, flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumenmonumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. Sedangkan menurut Ridwan (2012:5) pengertian objek wisata merupakan sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Selanjutnya obyek wisata alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam. Kemudian diperkuat pula oleh Marpaung (2012:78) yang menyatakan bahwa :Objek wisata adalah suatu

bentuk dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan travel motivation dan travel fashion, karena wisata ingin mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya ke suatu obyek wisata.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa objek wisata merupakan tempat yang menarik bagi wisatawan karena memiliki daya tarik tertentu. Objek wisata ini bisa berupa keindahan alam, bangunan bersejarah, atraksi budaya, dan lain-lain yang bersifat alamiah atau buatan manusia. Sementara itu, objek wisata harus memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang terdiri dari kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kedua definisi ini menekankan bahwa daya tarik objek wisata berasal dari unsur-unsur yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dan obyektif.

Menurut definisi dari Suharsimi Arikunto (2010: 3), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu hal, seperti situasi, peristiwa, kondisi, kegiatan, dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai upaya untuk menggambarkan atau memberikan

gambaran yang akurat terhadap suatu fenomena atau objek yang sedang diinvestigasi. Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifatsifat dari suatu populasi atau sampel.

Sugiyono (2019: 206) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menentukan suatu variabel bebas atau satu atau lebih nilai (independen) tanpa melakukan perbandingan atau menetapkan hubungan dengan variabel lain. Oleh karena itu, dalam penelitian deskriptif, peneliti mencoba memahami bagaimana suatu fenomena terjadi dan bagaimana karakteristik atau variabel tertentu berhubungan dengan fenomena tersebut.

b. Unit Analisis

a) Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang, Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo , Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

b) Objek penelitian

Sugiyono (2019:55) mengungkapkan bahwa objek penelitian adalah semua bentuk yang ditetapkan oleh peneliti untuk diselidiki, dengan tujuan memperoleh informasi dan setelah itu dibuat kesimpulan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa objek penelitian merujuk pada fokus atau elemen yang akan dianalisis dalam suatu penelitian. Pemilihan objek penelitian ini penting untuk menentukan area kajian dan menyesuaikan dengan lokasi penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian ini, objek penelitian adalah

Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Hal yang dijadikan pertimbangan bagi peneliti untuk memilih tempat penelitian di Kalurahan Kepuharjo dimana disana memiliki potensi sumber daya alam yang menarik dengan pemandangan yang indah serta langsung berhadapan dengan Gunung Merapi. Penelitian Governability ini membantu memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mendiskripsikan mengenai Governability atau kapasitas Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo. Penelitian ini mungkin dipicu oleh keinginan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat melalui pengelolaan sumber daya alam.

c) Subjek penelitian

Dalam mengidentifikasi informan dalam penelitian ini digunakan purposive sampel berupa kriteria yang dipilih oleh peneliti dalam kaitannya dengan pemilihan sampel. Dalam penelitian, sumber berita sangat penting karena wartawan adalah sumber informasi yang diperlukan untuk analisis. dan menanggapi masalah yang muncul dalam perjalanan penelitian. Dengan demikian dalam penelitian peneliti melakukan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi berupa Informasi atau rekaman yang terkait dengan isu yang sedang diselidiki.

Arikunto (2016:26) mendefinisikan subjek penelitian sebagai entitas, objek, atau individu yang menjadi fokus dalam penelitian, yang melibatkan

pengumpulan data terkait variabel penelitian dan menjadi pokok permasalahan. Maka dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian melibatkan pembatasan entitas, fenomena, atau individu yang menjadi fokus utama dalam penelitian, dengan mempertimbangkan variabel penelitian yang relevan dan masalah yang akan diselidiki.

Oleh karena itu, subjek penelitian yaitu seluruh komponen yang terdapat dalam Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo , Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. yang dimaksud adalah terdiri dari:

Tabel 1. 1 Data Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia
1	Heri Suprpto	Laki-laki	SD	62
2	Sumijo	Laki-laki	D3	49
3	Tulus Budi Wiranto	Laki-laki	Strata-1	55
4	Wiyana Suhadi	Laki-laki	SMA	45
5	Warjana	Laki-laki	-	47
6	Anjar	Laki-laki	Strata-1	29
7	Sri Sayuti	Perempuan	SMA	50
8	Wibowo	Laki-laki	Strata-1	23

Sumber : Data Primer

c. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Menurut Riduwan (2004:104), observasi didefinisikan sebagai metode pengumpulan data di mana peneliti dengan secara langsung memperhatikan objek penelitian untuk menyelidiki dengan teliti aktivitas yang sedang berlangsung. Metode observasi ini sering diartikan sebagai observasi sistematis

dan pencatatan gejala yang akan dipelajari. Teknik perseptual seperti observasi dan pencatatan secara sistematis harus dilakukan pada subjek yang aktif merespon objek. Dalam penelitian ini “Governability Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Sumber daya alam” beberapa hal yang dapat diobservasi meliputi kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Kepuharjo Observasi kemampuan dan keterampilan individu maupun organisasi Pemerintah desa Kepuharjo Melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti dalam mengelola sumber daya alam di Kepuharjo agar bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat disana.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terkait Otoritas Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mengelola sumber daya alam dengan melihat bagaimana kewenangan dalam mengambil keputusan Bersama Fokus pada situasi di mana keputusan signifikan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam diambil secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan yang telah disepakati.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sumber daya alam mengamati sejauh ini apa saja yang menjadi faktor pendukung mungkin tingkat partisipasi masyarakat disana sudah baik, sedangkan faktor penghambat sejauh ini yaitu masih belum memiliki izin dari Pemerintah Sleman disini peran Pemerintah Desa sangat penting karena Pemerintah Desa menjadi penanggung jawab di Desa dan seharusnya menjadi menampung aspirasi masyarakat.

Dengan demikian Observasi ini akan membantu memahami bagaimana Governability Pemerintah Desa dalam pemanfaatan sumber daya alam, sejauh mana kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan sumber daya alam ini supaya bisa berdampak kepada seluruh masyarakat.

Pada tahap observasi ini penelitian melakukan observasi langsung ke lapangan di Kalurahan Kepuharjo, untuk melihat kondisi Kalurahan Kepuharjo, mengambil data sesuai dengan Governability pemanfaatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo. Dalam hal ini beberapa hal yang dapat di observasi seperti melihat bagaimana kapasitas dari pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam pengelolaan sumber daya alam peran dari setiap stekholder yang berkepentingan, dan melihat bagaimana otoritas pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mengambil keputusan bersama, serta menjalankan kewenangan sesuai dengan tanggung jawab dan melihat apa saja program untuk melindungi habitat alam disana serta proses belum mendapatkan izin dari pemda Sleman. Setelah itu melihat dari segi faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan sumber daya alam disana.

b) Wawancara

Subbogyons (2011:39) mengartikan wawancara sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghimpun informasi dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden melalui pertanyaan-pertanyaan. Dalam percakapan pribadi dengan responden, ada wawancara menarik dan pelaksanaan kegiatan secara lisan. Oleh karena itu dapat disimpulkan Wawancara yang menarik merupakan wawancara yang mampu

membangkitkan minat dan perhatian responden sehingga mereka merasa ikut terlibat dalam proses wawancara dan memberikan jawaban yang jujur dan terbuka.

Nazir (2009:193) menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu proses perolehan informasi melalui dialog tanya jawab dalam konteks penelitian, yang melibatkan pewawancara dan responden menggunakan pedoman wawancara. 41 Dengan demikian, wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau respons secara langsung dari informan guna mencapai tujuan penelitian.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lurah selaku pemangku kepentingan di Kalurahan Kepuharjo dan tokoh masyarakat. Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan judul skripsi untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Proses wawancara dengan setiap informan memakan waktu yang berbeda-beda. Peneliti merancang pertanyaan dengan tujuan membuat informan dapat bercerita lebih detail tentang Governability Pemerintah Desa dalam pemanfaatan sumber daya alam serta aspek terkait lainnya.

Pada tahap wawancara dilapangan peneliti melakukan wawancara kepada informan yang terdiri dari Pemerintah Desa, seperti Lurah Heri Suprpto selaku Lurah Kepuharjo, BPD Kepuharjo pak Sumijo, dan ketua pokdarwis pak Wiyana Suhadi, dari pihak masyarakat peneliti melakukan wawancara dengan Mas Wibowo selaku masyarakat lokal, dari pihak karang taruna peneliti melakukan wawanacara dengan mas Anjar selaku ketua karang

taruna, kemudian dari pihak PKK peneliti melakukan wawancara dengan ibu Sri selaku ketua PKK, selanjutnya pihak Gapoktan peneliti melakukan wawancara dengan pak Warjana selaku ketua kelompok tani. Dalam proses wawancara ini tentu membutuhkan waktu yang berbeda-beda, setelah itu peneliti melakukan tanya jawab dengan informan yang dimana waktu yang digunakan dalam melakukan wawancara ke setiap informan memakan waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda juga. Dalam proses wawancara ini juga dilakukan di hari yang berbeda, proses wawancara ini tentu untuk mengetahui bagaimana kapasitas, otoritas dari pemerintah Kalurahan Kepuharjo terkait pengelolaan sumber daya alam, dan untuk mengetahui juga apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan sumber daya alam di Kepuharjo.

c) Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) menguraikan bahwa dokumentasi merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai sumber informasi yang sah. Dokumentasi dapat berupa buku, arsip, dokumen, laporan, catatan, surat, memo, tulisan angka, gambar, audio, video, dan lain sebagainya. Menurut Moleong (2005:217-219), dokumen-dokumen ini dibagi menjadi dua bagian, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Dokumen pribadi adalah rekaman tertulis yang mencakup tindakan, pengalaman, dan keyakinan seseorang. Makalah pribadi mencakup jenis-jenis

seperti buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. Sementara itu, dokumen resmi dapat diklasifikasikan sebagai dokumen internal atau eksternal. Dokumen internal mencakup catatan, pesan, dan instruksi. Sementara itu, dokumen eksternal melibatkan informasi yang disiapkan oleh organisasi publik, seperti surat kabar, buletin, pernyataan resmi, dan pesan yang disampaikan kepada media.

Dalam mengkaji Governability Pemerintah Desa dalam pemanffatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo maka dibutuhkan dokumentasi seperti Partisipasi Stakeholder dengan mencatat siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam, tingkat pastisipasi masyarakat, dan tingkat pastisipasi pemangku. serta bagaimana kontribusi masing-masing pemangku kepentingan. Data yang Dikumpulkan Catat semua data yang dikumpulkan selama penelitian, termasuk hasil wawancara, hasil survei, catatan lapangan, dan dokumen terkait seperti visimisi desa wisata serta profil desa wisata dan profil kalurahan. Penting untuk memiliki dokumentasi yang lengkap dan sistematis untuk mendiskripsikan, mengetahui serta mengevaluasi, dan membagikan temuan penelitian terkait dengan Governability Pemerintah Desa dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Pada tahap dokumentasi ini peneliti mengumpulkan beberapa dokumen-dokumen terkait yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian. Dokumen yang dimaksud seperti APBKAL, monografi desa, RPJMKAL, serta foto, dan data dokumen tersebut tentu menjadi pendukung dalam penelitian dan memudahkan bagi peneliti dalam melihat keadaan kondisi

Kalurahan Kepuharjo. Untuk mengevaluasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data merujuk pada teknik yang diterapkan untuk memeriksa dan mengolah data guna menghasilkan informasi yang dapat diandalkan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis data kualitatif, yang merupakan metode khas dalam ilmu sosial yang pada dasarnya berfokus pada observasi dan interaksi dengan individu dalam situasi kehidupan mereka sendiri.

Menurut sudut pandang Moleong (2017:6), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang terkait dengan pengalaman subjektif, seperti perilaku, motivasi, pengamatan, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dan diungkapkan melalui kata-kata dan bahasa alamiah dalam konteks lingkungan tertentu. Dapat disimpulkan Penelitian kualitatif sering digunakan untuk menjelaskan pengalaman subjek seperti perilaku, motivasi, dan tindakan dalam konteks alamiah tertentu. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian kualitatif mencakup teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Menurut saran Huberman dan Miles seperti yang dipaparkan oleh Sugiyono (2014: 246-253), direkomendasikan untuk melakukan analisis data kualitatif secara kolaboratif dan terus-menerus sampai data mencapai tingkat kepuasan. Proses analisis data melibatkan serangkaian langkah-langkah, meliputi:

a) Reduksi Data

Dalam pandangan Sugiyono (2018:247-249), reduksi data adalah langkah sintesis dan pemilihan elemen-elemen utama, dengan penekanan pada aspek-aspek yang terkait dengan pokok penelitian, mengidentifikasi tema dan pola yang muncul, serta pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih terperinci. Tujuan dari reduksi data adalah untuk mempermudah pengumpulan data lanjutan dan memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap inti penelitian. Dapat disimpulkan Reduksi data adalah proses mengurangi jumlah variabel atau atribut dalam suatu kumpulan mengolah data tanpa mengurangi informasi yang terdapat dalam data tersebut. Tujuan reduksi data adalah untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan analisis data serta menyederhanakan pemrosesan dan interpretasi data. Dengan menerapkan metode ini, Informasi yang berasal dari observasi, wawancara, dan dokumen dikumpulkan, disortir, dan dikelompokkan, lalu difokuskan tanpa mengurangi nilai informasi yang terkandung dalamnya. Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan data setelah itu data tersebut di analisis dan melihat data mana yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sesuai dengan obyek penelitian. Seperti melihat setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Supaya memberikan gambaran jelas kepada peneliti sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan pelaksanaan pengumpulan data yang memungkinkan diambilnya kesimpulan dan tindakan. Sugiyono (2017)

mencatat bahwa data dapat dipresentasikan dalam berbagai format, termasuk narasi singkat, diagram, relasi antar kategori, flowchart, atau format presentasi serupa. Dalam penelitian kualitatif, informasi seringkali disampaikan dalam bentuk teks naratif. Data yang diperoleh oleh Peneliti disajikan dengan menampilkan data dan informasi yang diperoleh saat melakukan observasi dan juga wawancara. Data-data tersebut sudah direduksi sedemikian rupa supaya analisis dapat dilakukan sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa dalam penelitian kualitatif, pengenalan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui uraian naratif, diagram, relasi antar kategori, flowchart, atau format presentasi lainnya.

Pada tahap penyajian data, melihat apa yang terjadi di lapangan melalui hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Proses ini dalam bentuk pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memeberikan kode, menelusuri tema dan, menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti terdiri dari pemeriksaan secara cermat terhadap data yang dikumpulkan di lapangan terkait pemanfaatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo yang memungkinkan adanya penarik kesimpulan.

c) Penarikan kesimpulan

Proses Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan dari analisis data kualitatif Merupakan hasil akhir dari proses pengumpulan, pengolahan dan interpretasi data kualitatif yang dilakukan peneliti. Sugiyono (2018:252-253) menyatakan bahwa dalam penelitian

kualitatif, kesimpulan mungkin memberikan tanggapan terhadap perumusan masalah yang diajukan sejak awal, tetapi tidak selalu demikian. Hal ini disebabkan, sebagaimana dijelaskan, bahwa perumusan dan diskusi mengenai masalah dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan cenderung berkembang seiring dengan proses penelitian di lapangan. Dengan demikian Kesimpulan ini berisi rangkuman dari temuan utama yang dihasilkan dari analisis data kualitatif dan menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Hasil analisis data kualitatif dapat berupa uraian tema atau pola yang muncul dari data atau tanggapan yang dikumpulkan atas pertanyaan penelitian yang dijawab berdasarkan interpretasi data kualitatif. Kesimpulan yang diambil melalui Analisis data kualitatif harus didasarkan pada bukti yang ditemukan dalam data yang dikumpulkan dan diorganisasikan secara sistematis dan mudah sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Kesimpulan ini juga harus reflektif. Artinya, peneliti harus berpikir kritis terhadap kelebihan dan kelemahan analisis yang dilakukan.

Pada tahap Menarik kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data yang dilakukan peneliti baik dalam pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. dimana peneliti melihat dari kasus-kasus yang ditemui saat turun ke lapangan dan Mengembangkan teori berdasarkan data. Peneliti membandingkan teori-teori tertentu dan mengevaluasi kesimpulan yang diambil. pengujian ini dirancang untuk memastikan kebenaran analisis untuk memberikan kesimpulan yang dapat dipercaya.

BAB II
PROFIL KALURAHAN KEPUHARJO
DAN GAMBARAN UMUM OBJEK WISATA

A. Sejarah Kalurahan Kepuharjo

Kalurahan Kepuharjo memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari masa penjajahan dimana kalurahan ini dikenal sebagai Kepuhsari. Pada tahun 1952, nama tersebut diubah menjadi Kepuharjo. Selama beberapa periode, balai kalurahan mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, termasuk di Padukuhan Kepuh, Padukuhan Batur, dan Padukuhan Petung, sebelum akhirnya pada tahun 1981 berganti nama menjadi Kalurahan Kepuharjo dan berpindah ke Padukuhan Kopeng hingga tahun 2010. Selama periode tersebut, Kalurahan Kepuharjo telah dipimpin oleh 8 Lurah yang berbeda. Salah satu Lurah yang menonjol adalah Bapak Ngatmo Wagito dari Padukuhan Petung, yang memiliki prestasi luar biasa dalam bidang lingkungan hidup dengan dua kali meraih penghargaan Kalpataru dari Presiden Soeharto. Sayangnya, bukti penghargaan tersebut hilang dalam erupsi Merapi tahun 2010. Berikut adalah daftar kepala kalurahan Kepuharjo:

1. Lurah I: Bapak Kromo Diarjo
2. Lurah II: Bapak Sastro Wiyono
3. Lurah III: Bapak Noto
4. Lurah IV: Bapak Cipto Wiyono
5. Lurah V: Bapak Ngatmo Wagito
6. Lurah VI: Bapak Sujudi

7. Lurah VII: Bapak Agustina Pujiwinarno, SS
8. Lurah VIII: Bapak Heri Suprpto (2007-2013)
9. Lurah IX: Bapak Heri Suprpto (2013-2019)
10. Lurah X: Bapak Heri Suprpto (2020-2026)

B. Visi-Misi Kalurahan Kepuharjo

1. Visi Kalurahan Kepuharjo

"MEWUJUDKAN MASYARAKAT DESA KEPUHARJO YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS PETERNAKAN." Penjelasan visi ini meliputi tiga poin utama:

- 1) Masyarakat Sejahtera : Ini bermakna bahwa Desa Kepuharjo bertujuan untuk membangun masyarakat yang merasa sejahtera secara fisik dan mental, serta hidup harmonis sesuai dengan nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku di desa Kepuharjo.
- 2) Masyarakat Mandiri : Desa Kepuharjo ingin mengembangkan masyarakat yang mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak luar, memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengatasi masalah sendiri, serta memiliki keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Masyarakat Berbasis Peternakan : Ini menggambarkan upaya Desa Kepuharjo dalam membangun masyarakat yang memiliki dasar

ekonomi dari sektor peternakan. Desa Kepuharjo berharap bahwa peternakan akan menjadi tulang punggung utama dalam perekonomian masyarakatnya.

2. Misi Kalurahan Kepuharjo

Misi Desa Kepuharjo yang merinci operasionalisasi dari visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendukung dan mendorong kegiatan yang terkait dengan sektor peternakan.
- 2) Menjalin kemitraan dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk meningkatkan produksi peternakan.
- 3) Mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi ekonomi desa demi kesejahteraan masyarakat.
- 4) Mengembangkan industri rumah tangga dan kecil pasca panen hasil peternakan.
- 5) Berkolaborasi dengan pemerintah dan institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan keterampilan pengolahan dan fermentasi pakan ternak.
- 6) Membangun dan mendukung kemitraan untuk pengembangan terutama di bidang pertanian dan peternakan.
- 7) Memastikan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan mitigasi bencana.
- 8) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab, keramahan, dan kemandirian.
- 9) Memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan desa.

10) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program desa.

C. Kondisi Geografis Kalurahan Kepuharjo

Kalurahan Kepuharjo, terletak sekitar 4,5 Km di utara Kapanewon Cangkringan dan 27 Km di timur laut ibukota Sleman, memiliki akses yang baik melalui jalan raya dan mudah dijangkau dari daerah sekitarnya. Secara geografis, wilayahnya terletak di koordinat 07O40'42.7"LS - 07O43'00.9"LS dan 110O27'59.9"BT - 110O28'51.4"BT, dengan ketinggian antara 600 - 1200 m dari permukaan laut, curah hujan rata-rata 2500 mm/tahun, dan suhu rata-rata 16-17°C pertahun.

Dua sungai besar, yaitu sungai Gendol dan sungai Opak, melintasi wilayah Kalurahan Kepuharjo. Sungai Gendol, di sebelah timur, merupakan jalur dari gunung Merapi yang aktif, sementara sungai Opak, di sisi barat, membelah wilayahnya dan juga merupakan alur dari Merapi. Dengan kondisi ini, pemerintah Kalurahan Kepuharjo bekerja sama dengan instansi terkait seperti BPBD Provinsi DI Yogyakarta dan BPBD saat terjadi erupsi Merapi atau banjir lahar dingin, untuk mengantisipasi dan menangani dampaknya.

1) Batas Wilayah

Secara administratif, Kalurahan Kepuharjo berada di wilayah Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Taman Nasional Gunung Merapi
- Sebelah Selatan : Kalurahan Wukirsari,
- Sebelah Barat : Kalurahan Umbulharjo
- Sebelah Timur : Kalurahan Glagaharjo

Kalurahan Kepuharjo merupakan bagian dari wilayah administratif Kapanewon Cangkringan, yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya yang strategis, tepat di lereng Gunung Merapi, memberikan ciri khas tersendiri bagi wilayah ini. Kepuharjo dikenal akan lingkungan alamnya yang subur dan pemandangan yang memukau, namun juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi karena dekatnya dengan gunung berapi yang aktif.

Dengan terdirinya 8 padukuhan di dalamnya, Kalurahan Kepuharjo memiliki jaringan masyarakat yang padat dengan total 33 RT dan 16 RW. Hal ini menunjukkan keberagaman dan kepadatan populasi di wilayah tersebut. Kehidupan masyarakat di setiap padukuhan dapat mencerminkan beragam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang khas.

Selain itu, keberadaan 8 padukuhan juga mencerminkan kesatuan dalam keragaman, di mana setiap padukuhan memiliki keunikan dan karakteristik sendiri dalam hal tradisi, adat istiadat, serta potensi ekonomi dan sumber daya

alam yang dimiliki. Ini menciptakan lanskap sosial yang kaya dan beragam, yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kepuharjo secara keseluruhan. Wilayah Kalurahan Kepuharjo terdiri dari 8 padukuhan meliputi 33 RT dan 16 RW dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Pembagian Wilayah Padukuhan, RW/RT Kalurahan Kepuharjo

No	Nama Padukuhan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kaliadem	2	4
2	Jambu	2	4
3	Petung	2	4
4	Kopeng	2	5
5	Batur	2	4
6	Pagerjurang	2	4
7	Kepuh	2	4
8	Manggong	2	4
Total		16	33

Sumber : Website Kalurahan Kepuharjo

(<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/wilayah> Diakses Tanggal 19 April 2024)

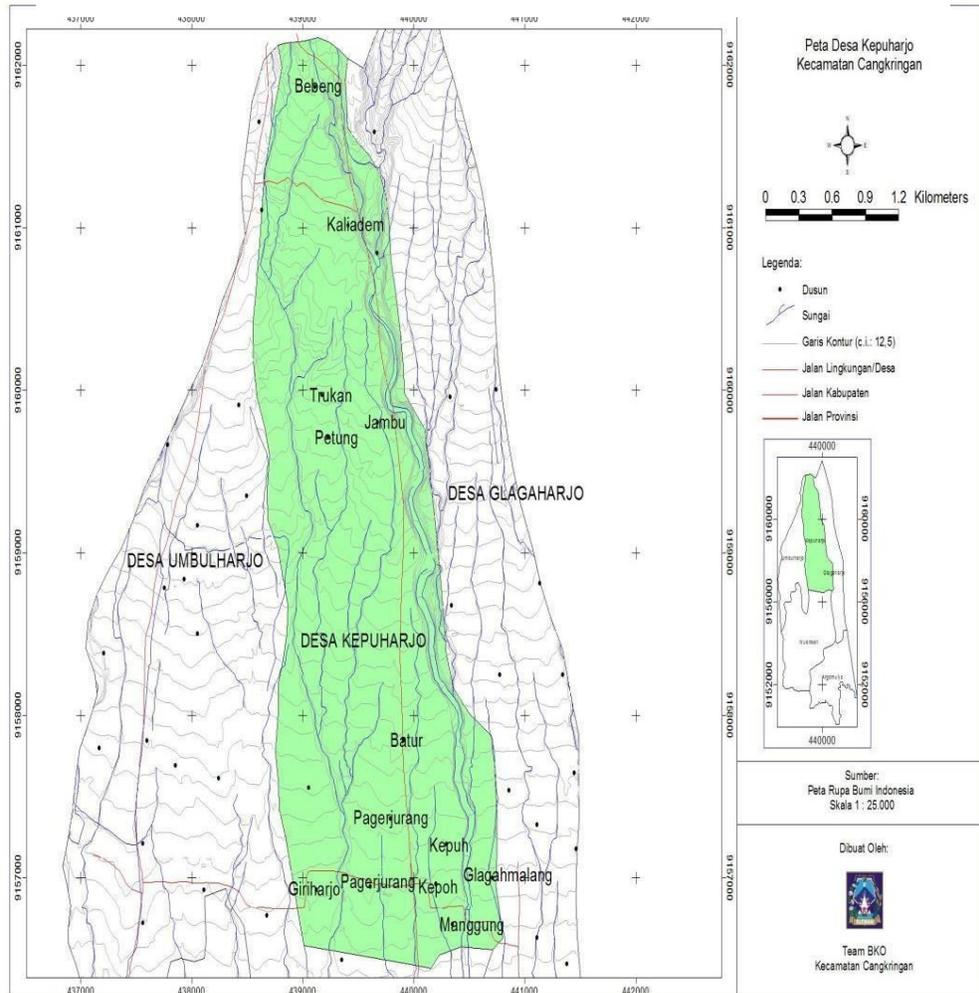
Akibat dari letusan Gunung Merapi pada tahun 2010, sebagian besar hunian warga dan infrastruktur di Kalurahan Kepuharjo mengalami kerusakan. Sebagai hasilnya, sebagian besar penduduk Kepuharjo kini tinggal di hunian tetap Batur dan Pagerjurang. Di hunian tetap Pagerjurang, penduduk berasal dari beberapa padukuhan, termasuk Pagerjurang, Kepuh, Manggong, Kaliadem, dan Petung, yang menempati lokasi tanah kas desa di selatan Merapi Golf. Sementara itu, hunian tetap Batur dihuni oleh sebagian kecil penduduk dari Padukuhan Batur, Kopeng, dan Jambu. Wilayah Kopeng masih dihuni sebagian penduduknya dengan prinsip "Living In Harmony," yang berarti hidup berdampingan dengan alam, terutama Gunung Merapi, dan siap untuk

mengungsi jika terjadi letusan. Hunian tetap yang ditinggalkan oleh penduduk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, pariwisata, dan peternakan.

2) Peta

Peta kalurahan adalah representasi visual dari wilayah administratif terkecil di Indonesia yang disebut kalurahan, yang setara dengan desa di wilayah lain. Peta ini menampilkan batas-batas geografis kalurahan, seperti lokasi yang ada di wilayah tersebut. Peta kalurahan digunakan untuk melihat lokasi di setiap padukuhan dan batasnya dengan memberikan representasi visual yang rinci mengenai pembagian wilayah di dalam kalurahan. Peta kalurahan menampilkan semua padukuhan (dusun) yang ada di dalam wilayah kalurahan. Setiap padukuhan ditandai dengan jelas, biasanya dengan nama dan batas yang berbeda untuk memudahkan identifikasi. Peta kalurahan memberikan batas geografis yang jelas untuk setiap padukuhan. Batas ini ditandai dengan garis-garis yang memisahkan satu padukuhan dari yang lain, membantu dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik.

Gambar 2. 1 Peta Kalurahan Kepuharjo



Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

3) Kondisi Wilayah

Desa Kepuharjo, dengan luas wilayah 875 Ha, memiliki potensi yang beragam dengan berbagai peruntukan lahan seperti bangunan umum, jalan, ladang, permukiman, pekuburan, tempat wisata, Lapangan Golf, lapangan olahraga, dan lain-lain. Berikut tabel keluasan wilayah Desa Kepuharjo per Padukuhan, serta grafik keluasan lahan dan pekarangan.

Tabel 2. 2 Data Luas Wilayah Kalurahan Kepuharjo Per Padukuhan

No	Nama Dusun	Luas Perkarangan	Luas Tegalan	Jumlah Luas Total
1	KALIADEM	420.820	296.600	717.420
2	JAMBU	375.975	218.250	594.225
3	PETUNG	570.580	405.860	976.440
4	KOPENG	3.339.465	294.645	617.610
5	BATUR	317.505	318.865	691.370
6	PAGERJURANG	227.495	322.325	549.820
7	KEPUH	255.795	400.325	656.120
8	MANGGONG	174.930	256.815	431.745
	JUMLAH TOTAL	5.626.565	2.513.685	4.644.242

Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

Dari tabel tersebut, dapat diambil kesimpulan luas total wilayah Kalurahan Kepuharjo adalah 4.644.242 Ha. Dari total luas wilayah, sebagian besar wilayah digunakan sebagai tegalan, dengan total luas 2.513.685 Ha. Diikuti oleh luas perkarangan yang mencapai 5.626.565 Ha. Ini menunjukkan bahwa pertanian, terutama pertanian tegalan, merupakan kegiatan dominan dalam pemanfaatan lahan di Kalurahan Kepuharjo. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam luas perkarangan dan tegalan antara padukuhan di Kalurahan Kepuharjo. Padukuhan Kopeng memiliki luas perkarangan yang paling besar dengan 3.339.465 Ha, sementara Padukuhan Kaliadem memiliki luas tegalan terbesar dengan 296.600 Ha. Kemungkinan besar, Padukuhan dengan luas perkarangan yang lebih besar, seperti Kopeng dan Petung, dapat menampung lebih banyak penduduk atau memiliki aktivitas pertanian yang

lebih intensif. Dengan demikian, analisis dari tabel tersebut menunjukkan bahwa Kalurahan Kepuharjo memiliki potensi pertanian yang besar dan menjadi poin penting dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

4) Kondisi Topografi

Dari segi topografi, wilayah Kepuharjo memiliki ketinggian yang bervariasi, yakni antara 600 hingga 1200 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian yang beragam ini menciptakan kondisi geografis yang unik dan beragam dalam desa tersebut. Selain itu, desa ini juga ditandai dengan curah hujan yang cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 2500 mm per tahun. Tingginya curah hujan ini memberikan dukungan yang baik bagi sektor pertanian dan pertumbuhan vegetasi di wilayah tersebut.

Suhu rata-rata per tahun di Kalurahan Kepuharjo berkisar antara 16 hingga 17 derajat Celsius. Suhu yang relatif sejuk ini cenderung stabil sepanjang tahun. Kondisi suhu yang tidak terlalu panas maupun terlalu dingin ini mendukung kenyamanan bagi aktivitas sehari-hari penduduk serta juga berpengaruh terhadap jenis tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, kondisi topografi yang beragam, curah hujan yang tinggi, dan suhu yang sejuk memberikan ciri khas tersendiri bagi wilayah Kepuharjo. Hal ini juga memengaruhi aktivitas pertanian, kehidupan masyarakat, serta potensi wisata alam di desa tersebut.

D. Kondisi Demografi Kalurahan Kepuharjo

Kondisi demografi mengacu pada karakteristik populasi suatu wilayah atau negara, yang meliputi berbagai aspek seperti kelompok usia, kelompok pekerjaan, kelompok agama dan kelompok pendidikan. Kondisi demografi memberikan gambaran tentang dinamika populasi suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu. Analisis kondisi demografi penting karena memberikan wawasan tentang dinamika populasi suatu wilayah, yang menjadi dasar perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dengan memahami kondisi demografi, pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik populasi yang ada.

1. Data Berdasarkan kelompok usia

Berdasarkan kelompok usia, data demografi memberikan informasi tentang distribusi penduduk dalam berbagai rentang usia. Pengetahuan tentang distribusi penduduk dalam berbagai kelompok usia membantu dalam perencanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Dengan memahami struktur usia populasi, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Berikut tabel data penduduk Kalurahan Kepuharjo berdasarkan kelompok usia :

Tabel 2. 3 Kelompok Usia Penduduk Kalurahan Kepuharjo

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki(Jiwa)	Perempuan(Jiwa)	
1	Dibawah 1 Tahun	28	14	42
2	1-4 Tahun	67	45	112
3	5-9 Tahun	122	121	243
4	10-14 Tahun	134	139	273
5	15-19 Tahun	150	115	268
6	20-24 Tahun	140	163	306
7	25-29 Tahun	150	143	298
8	30-34 Tahun	119	122	246
9	35-39 Tahun	100	124	225
10	40-44 Tahun	126	131	259
11	45-49 Tahun	156	164	324
12	50-54 Tahun	146	152	300
13	55-59 Tahun	129	111	242
14	60-64 Tahun	105	103	209
15	65-69 Tahun	65	78	146
16	70-74 Tahun	57	76	135
17	Diatas 75 Tahun	114	185	311
18	-	341	441	800
19	-	55	31	86
Total		1.845	1.886	3.885

Sumber : Website Kalurahan Kepuharjo

(<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/kelompok-umur>Diakses Tanggal 19 April 2024)

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat membuat beberapa kesimpulan terkait dengan distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin. Terlihat bahwa jumlah penduduk cenderung menurun seiring bertambahnya kelompok usia, dengan jumlah tertinggi terdapat pada kelompok usia 45-49 tahun, kemudian menurun secara perlahan hingga kelompok usia di atas 75 tahun. Hal ini mencerminkan pola demografi yang umum di mana populasi paling padat berada di kelompok usia produktif dan jumlahnya menurun pada kelompok usia yang lebih tua. sebagian besar kelompok usia,

terdapat sedikit perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan, namun, terdapat beberapa kelompok usia di mana perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan cukup signifikan. Misalnya, pada kelompok usia 20-24 tahun, jumlah perempuan (163 orang) lebih banyak daripada jumlah laki-laki (140 orang). Hal ini mungkin mencerminkan faktor-faktor seperti migrasi, tingkat kelahiran, dan faktor-faktor sosial lainnya. kelompok usia yang rentan seperti di bawah 1 tahun dan di atas 75 tahun, di mana perhatian khusus diperlukan dalam hal perawatan kesehatan dan kesejahteraan. Kelompok usia ini cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah dan memerlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Analisis data ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin di wilayah tersebut. Ini memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan kebijakan di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari setiap kelompok usia dan jenis kelamin.

2. Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk suatu wilayah. Dalam tabel ini, pendidikan dibagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari tidak atau belum tamat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi seperti sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Setiap tingkat pendidikan memiliki jumlah individu laki-laki dan perempuan yang terdaftar, serta jumlah total penduduk dalam setiap kategori. Tabel ini penting untuk memahami distribusi pendidikan

di suatu populasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi tren pendidikan, kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan, serta kebutuhan pendidikan dalam perencanaan pembangunan sosial dan ekonomi. Melalui data ini, dapat dianalisis tingkat aksesibilitas pendidikan di suatu wilayah, efektivitas program pendidikan, serta upaya yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan penduduk. Kesimpulan yang dapat diambil dari data ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Berikut rincian tabel data penduduk menurut pendidikan Kalurahan Kepuharjo :

Tabel 2. 4 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/ Belum Sekolah	110	77	187
2	Tidak / Belum Tamat Sekolah Dasar	137	141	278
3	Tamat SD	272	327	599
4	SLTP/Sederajat	169	161	330
5	SLTA/Sederajat	355	304	659
6	Diploma I/II	2	7	9
7	Diploma III	16	27	43
8	Strata I	29	32	61
9	Strata II	3	2	5
10	Strata III	0	0	0
Jumlah		1.845	1.886	3.885

*Sumber : Website Kalurahan Kepuharjo
(<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/pendidikan-dalam-kk>
Diakses Tanggal 19 April 2024)*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan tingkat pendidikan dan distribusi jenis kelamin peserta pendidikan di suatu wilayah Mayoritas penduduk telah mengikuti pendidikan formal, dengan hanya sebagian kecil yang tidak atau belum mengikuti pendidikan Tidak/Belum

Sekolah 187 jiwa dan Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar 278 jiwa. Kesetaraan dalam partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan, di mana jumlah perempuan sedikit lebih banyak daripada jumlah laki-laki pada beberapa tingkatan pendidikan, seperti SLTA/Sederajat dan Diploma III. Jumlah peserta pendidikan tampak menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian peserta pendidikan yang tidak melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan tingkat tertentu, seperti setelah menyelesaikan SLTA/Sederajat. Jumlah peserta pendidikan pada tingkat pendidikan tinggi (Diploma III, Strata I, Strata II, dan Strata III) cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat pendidikan menengah (SD, SLTP, SLTA). Hal ini mencerminkan tingkat aksesibilitas dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. Mayoritas penduduk telah mengikuti pendidikan formal, dengan partisipasi yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan akses dan kesetaraan dalam pendidikan, terutama dalam meningkatkan tingkat kelulusan dan partisipasi pada tingkat pendidikan tinggi.

3. Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Tabel di bawah ini memberikan gambaran tentang berbagai jenis mata pencaharian yang diambil oleh penduduk suatu wilayah, yang dibagi berdasarkan jenis kelamin. Data ini meliputi jumlah individu laki-laki dan perempuan dalam setiap kategori mata pencaharian, serta jumlah total penduduk dalam masing-masing kategori. Informasi ini penting untuk

memahami struktur pekerjaan dan partisipasi angkatan kerja dalam suatu populasi. Dengan memahami pola mata pencaharian, dapat dilakukan analisis tentang sektor-sektor ekonomi yang dominan, pembagian peran gender dalam dunia kerja, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Data ini memberikan wawasan tentang komposisi pekerjaan dalam populasi tersebut, memungkinkan untuk analisis lebih lanjut terkait dengan distribusi pekerjaan, partisipasi angkatan kerja, dan potensi kebijakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 5 Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kalurahan Kepuharjo

No	Jenis Mata Pencaharian	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	Jumlah (Orang)
1	Petani/Pekebun	557	593	1150
2	Belum/ Tidak Bekerja	364	311	675
3	Pelajar/ Mahasiswa	303	299	602
4	Karyawan/ Swasta	254	208	462
5	Mengurus Rumah Tangga	5	406	411
6	Wiraswasta	182	84	266
7	Buruh Harian Lepas	114	11	125
8	Sopir	34	0	34
9	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	19	10	29
10	Pensiunan	16	9	25
11	Guru	4	16	20
12	Perangkat Desa	18	0	18
13	Pedagang	1	13	14
14	Peternak	7	5	12
15	Buruh Tani/Perkebunan	5	2	7
16	Pembantu Rumah Tangga	0	4	4
17	Karyawan BUMN	4	0	4
18	Lainnya	3	1	4
19	Karyawan Honorer	1	3	4
20	Perdagangan	0	4	4
21	Kepolisian RI	2	1	3
22	TNI	3	0	3
23	Seniman	2	0	2
24	Perawat	0	2	2

25	Dosen	0	2	2
26	Transportasi	0	1	1
27	Tukang Batu	1	0	1
28	Mekanik	1	0	1
29	Kepala Desa	1	0	1
30	Anggota DPRD	1	0	1
31	Pelaut	1	0	1
32	Arsitek	0	1	1
Total		3.885	1.845	1.886

*Sumber : Website Kalurahan Kepuharjo
(<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/pekerjaan> Diakses
Tanggal 19 April 2024)*

Berdasarkan tabel di atas, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan jenis mata pencaharian dan distribusi jenis kelamin di suatu wilayah. Mata pencaharian yang dominan adalah sebagai petani/pekebun dengan jumlah total 1.150 orang, diikuti oleh kategori belum/tidak bekerja (675 orang), pelajar/mahasiswa (602 orang), dan karyawan/swasta (462 orang). Terdapat perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa jenis mata pencaharian. Misalnya, mayoritas petani/pekebun adalah perempuan (593 orang) sementara karyawan/swasta mayoritas adalah laki-laki (254 orang). Demikian pula dengan mengurus rumah tangga, yang mayoritas diisi oleh perempuan (406 orang). Perempuan lebih dominan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga dan pelayanan seperti mengurus rumah tangga dan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga. Sementara itu, laki-laki cenderung mendominasi sektor pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik seperti petani/pekebun, buruh harian lepas, dan mekanik. Distribusi mata pencaharian menunjukkan variasi yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan pola gender dalam pasar tenaga kerja dan juga peran tradisional

gender dalam masyarakat setempat. Kesimpulan ini memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi dan sosial di wilayah tersebut serta memberikan dasar bagi pembangunan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. Data Penduduk Menurut Agama

Tabel di bawah ini menyajikan data tentang distribusi penduduk berdasarkan agama di suatu wilayah. Data ini memperlihatkan jumlah individu laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok agama, serta total keseluruhan penduduk dalam masing-masing kategori agama. Informasi ini penting untuk memahami keragaman agama dalam suatu populasi dan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis demografis, pemetaan distribusi agama, serta perencanaan kebijakan yang memperhatikan keberagaman agama dalam masyarakat. Data ini memberikan gambaran tentang komposisi agama dalam populasi suatu wilayah, yang dapat digunakan untuk analisis demografis, pemetaan keberagaman agama, serta pengembangan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan serta keberagaman agama dalam masyarakat.

Tabel 2. 6 Data Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Islam	1.904	1.980	3.884
2	Kristen	0	0	0
3	Katolik	1	0	1
4	Hindu	3	1	4
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
Total		1.908	1.981	3.889

Sumber : Website Kalurahan Kepuharjo

(<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/agama> Diakses Tanggal 19 April 2024)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Agama Islam mendominasi populasi dalam tabel, dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.904 orang dan perempuan sebanyak 1.980 orang, yang totalnya mencapai 3.884 orang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk dalam wilayah tersebut memeluk agama Islam. Meskipun Islam mendominasi, terdapat juga minoritas agama lainnya seperti Hindu yang memiliki jumlah yang cukup signifikan, yaitu 4 orang (3 laki-laki dan 1 perempuan). Sedangkan laki-laki katolik 1 orang. Namun, tidak ada data yang tercatat untuk Kristen, Budha, dan Khonghucu, yang mungkin menunjukkan bahwa populasi mereka sangat kecil atau tidak ada sama sekali di wilayah tersebut. Terdapat sedikit perbedaan antara jumlah laki-laki dan perempuan yang memeluk agama Islam. Jumlah perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Data ini memberikan gambaran tentang komposisi agama dalam populasi suatu wilayah, yang dapat menjadi dasar untuk analisis demografis, pemetaan keberagaman agama, dan pengembangan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan serta keberagaman agama dalam masyarakat.

E. Kondisi Sosial Budaya Dan Ekonomi

1. Kondisi Sosial Budaya

Keadaan sosial budaya dalam penyusunan draft RPJMKal Kepuharjo Mencakup seluruh aspek sosial budaya dan kelembagaan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, lingkungan dan tradisi penduduk setempat. Wilayah Kepuharjo merupakan wilayah yang kaya akan potensi sosial budaya

dan kelembagaan yang beragam. Permasalahan sosial budaya dan kelembagaan yang ada harus segera diselesaikan.

Potensi sosial budaya yang melimpah terdapat di Kalurahan Kepuharjo, dengan masyarakatnya yang masih erat dengan nilai-nilai budaya Jawa. Fenomena ini dapat dimaklumi karena hampir seluruh Kalurahan di Kabupaten Sleman terpapar kuat oleh kehadiran pusat kebudayaan Jawa, tercermin dari eksistensi Keraton Kasultanan dan Pakualaman di Yogyakarta. Dari sudut pandang budaya, kita dapat melihat bagaimana faktor-faktor budaya dan sosial memengaruhi kehidupan masyarakat. Terkait dengan keyakinan agama, sebagai contoh, mayoritas masyarakat menganut Islam, yang dijalankan dengan kuatnya nilai-nilai budaya Jawa seperti acara kenduri atau kondangan yang sering diadakan untuk merayakan hari besar Islam dan acara peringatan lainnya. Kalurahan Kepuharjo memiliki sebuah acara budaya yang sangat terkenal dan ada turun temurun sejak nenek moyang, diantaranya adalah:

- 1) Becekan atau upacara adat dandan kali dengan menyembelih kambing yang kesemua tenaga baik penyiapan hingga pada saat memasak daging kambing adalah seluruhnya kaum pria. Upacara adat ini terdapat di sungai Gendol yang dilaksanakan pada mongso kapat hari Jumat Kliwon pada kalender penanggalan jawa, yang dilaksanakan oleh tiga padukuhan yaitu Pagerjurang, Kepuh Manggong. Selain itu juga ada adat serupa berupa becekan di Kali Petung Padukuhan Petung yang dilaksanakan juga setahun sekali.

- 2) Di Kalurahan Kepuharjo ini terdapat beberapa jenis kesenian dachrah yang masih ada sampai sekarang. Diantaranya Kesenian jathilan, kelompok campursari, kethoprak, seni tari, cokekan, merupakan suatu kesenian yang tetap bertahan dari dulu hingga sekarang di wilayah Kepuharjo.
- 3) Upacara Mitoni, yaitu selamatan pada saat usia kehamilan seseorang mencapai tujuh bulan.
- 4) Upacara Puputan, yaitu upacara selamatan pada saat tali pusar bayi sudah lepas/mengering.
- 5) Jagongan, yaitu acara wungon atau bertandang ke rumah keluarga yang baru melahirkan bayi pada saat malam hari selama kurang lebih 7 samapi dengan 35 hari.
- 6) Selapanan, yaitu acara kenduri atau selamatan bertepatan dengan usia bayi berumur 35 hari.
- 7) Upacara kematian, yaitu diawali dari surtanah dihari pertama kematian, kenduri tiga hari, tujuh hari, 40 hari, setahun, dua tahun sampai 1000 hari.
- 8) Upacara khitanan, yaitu tanda bahwa anak lelaki sudah mulai menginjak aqil balig berangkat menjadi laki laki dewasa.
- 9) Upacara pernikahan, dengan berbagai urutan pernik pernik tradisi Jawa, seperti siraman, mododareni, ijab, panggih, dan resepsi.

Tabel 2. 7 Kegiatan Sosial Dan Budaya

No	Padukuhan	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	Kaliadem	Bersih-Bersih Jalan	Lima Hari X 1	Dilakukan Setiap Pasaran Wage
		Pengajian	Seminggu Sekali	
		Siskamling	1 X Seminggu	Dilakukan Secara Bergiliran Oleh Penduduk Laki-Laki Dewasa
		Arisan	1 X Sebulan	
2	Jambu	Kebersihan Lingkungan	1 X Seminggu	
		Arisan	1 X Sebulan	
		Kelompok Arisan Ibu-Ibu	1 X Seminggu	
		Kelompok Ternak Sapi	1 X Sebulan	
		Kelopok Seni Campursari	1 X Sebulan	
		Kelompok Seni Tari	1 X Sebulan	
		Kelompok Pengajian Ibu-Ibu	1 X Sebulan	
		Kelompok Siskamling	1 X Sebulan	
		Kelompok Wanita Tani		
		Karang Taruna	1 X Sebulan	
3	Petung	Kelompok Tani	1 Bulan Sekali	Penyuluhan Goyong-Royong
		Kelompok Ternak Sapi	1 Bulan Sekali	Penyuluhan Arisan
		Kelompok Seni Karawitan	1 Bulan Sekali	Latihan Rutin
		Kelompok Seni Tari	Per Minggu	Latihan Rutin
		Kelompok Pengajian Ibu-Ibu	4 Kali Sebulan	Pengajian, Ceramah, Penyuluhan
		Kelopok Siskamling	Setiap Hari Bergiliran	Ronda
		Kelompok Wanita Tani	1 Bulan Sekali	Bercocok Tanam
		Kelompok Wajik Jagung	1 Kali Seminggu	Membuat Wajik Jagung

		Kelompok Criping Enthik	1 Kali Seminggu	Mebut Criping
		Kelompok Karang Taruna	1 Bulan Sekali	Pertemuan Rutin
4	Kopeng	Gotong-Royong Kebersihan Lingkungan	1 Kali Seminggu	Menjaga Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan
		Kegiatan Hari Besar Nasional	1 Kali Setahun	Pentas Seni
		Siskamling	1 Kali Seminggu	3 Pos Ronda
		Pengajian	1 Kali Seminggu	Membaca Surat Yasin
		Kesenian Jatilan	2 Kali Sebulan	Latihan Bersama
		Campur Sari	1 Kali Seminggu	Latihan Bersama Dan Mempelajari Lagu Baru
		Kethoprak	1 Kali Seminggu	Latihan Bersama Pentas Dalam Rangka Peringatan Hari Besar
5	Batur	Kelompok Pemuda	1 Kali Seminggu	Pertemuan Rutin
		Siskamling	Harian	Tiap Malam
		Pengajian	Mingguan	Kelompok Yasin 1 Kali Seminggu Kelompok Pengajian Ibu-Ibu(TPI) 2 X Seminggu
		Koperasi	1 Bulan Sekali	
		Gotong Royong	1 Kali Sebulan	
6	Pagerjurang	PKK	2	
		KTW	2	
		Kelompok Tani	3	
		Karang Taruna	2	
		Koperasi Subur	1	
		Olahraga/Pemuda	4	
		Kelompok Ternak	2	
		Siskamling	7	
		Jimpitan	7	
		Kerja Bakti	Tiap Rt	

		Pengajian	70			
		TPA	30			
7	Kepuh	Siskamling	7 Kali Seminggu	Giliran Laki-Laki Dewasa		
		Pengajian	1 Kali Sebulan	Masjid		
		Arisan	1 Kali Seminggu	Rumah Warga		
		PKK	1 Bulan Sekali	Rumah Warga		
		KTW	1 Bulan Sekali	Rumah Warga, Kebun Anggota		
		Posyandu Lansia	1 Kali Sebulan	Rumah Warga		
		Kegiatan Peringatan Hari Besar	4 Kali Setahun	Rumah Warga		
		Gotong-Royong	4 Kali Sebulan	Rumah Warga		
		Kelompok Tani	1 Bulan Sekali	Bimbingan Dinas Pertanian		
		Kelompok Ternak	1 Bulan Sekali	Bimbingan Dinas Peternakan		
		Seni Jathilan	1 Bulan Sekali	Latihan, Ikut Frestival		
		Kelompok Pengajian	1 Bulan Sekali	Rutin		
		Siskamling	Setiap Hari	Warga Laki-Laki Dewasa		
		Tagana (Taruna Siaga)	Menyesuaikan	Melibatkan Warga		
		TPA	2 Kali Seminggu	Anak-Anak		
		Kelompok Pengelola Air Bersih	1 Bulan Sekali	Seluruh Warga Dusun		
		PAUD	1 Kali Seminggu	Anak-Anak Balita		
			Manggong	Arisan	1 Kali Seminggu	
				Senam	1 Kali Seminggu	
PAUD	2 Kali Seminggu					
Koprasi	1 Bulan Sekali					
Kelompok Tani Kopi Dan Pisang	1 Bulan Sekali					
Rapat Dusun	1 Bulan Sekali					
PKK	Simpan Pinjam, Arisan					
Koperasi Petruk	Simpan Pinjam					
KTW	Simpan Pinjam					
Posyandu Balita	Timbangan, PMT					
Posyandu Lansia	Senam, Arisan					
Kelompok Tani Kopi	Kerja Bakti, Simpan Pinjam, Arisan					

		Kelompok Tani Pisang	Pembibitan, Simpan Pinjam, Arisan	
		Karang Taruna	Perteuan Rutin, Arisan	
		Kejar Paket B	Karawitan Dan Produksi Pangan Lokal	
		Pertemuan Dusun	Iuran Rutin, Simpan Pinjam, Pertemuan	

Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

2. Kondisi Ekonomi

Kegiatan perekonomian yang terdapat di Kalurahan Kepuharjo di antaranya, kelompok simpan pinjam sebanyak 8 buah dengan keanggotaan mencapai ratusan orang ditiap tiap padukuhan. Usaha-usaha ekonomi Kalurahan seperti warung makan dan warung kelontong kurang lebih sebanyak 45 buah tersebar di lokasi wisata dan lingkungan pemukiman. Selain itu masih terdapat berbagai macam usaha, seperti usaha depo pasir, depo kayu yaitu usaha jual beli kayu hasil hutan/perkebunan, perbengkelan meliputi bengkel elektronik dan benbgkel kendaraan bermotor, pembuatan tas skala home industri, dan usaha-usaha jasa lainnya. Lembaga/kelompok perekonomian yang terdapat di Kepuharjo diantaranya: Koperasi Simpan Pinjam Petruk di Padukuhan Manggong, Koperasi PALEM di Padukuhan Batur, UEP Kepuharjo, Persatuan Pedagang Kelontong Kepuharjo, Guyub Bakul Jambu, Paguyuban Bakul Kaliadem, Paguyuban Pengelola Air "Toya Rasa", Paguyuban Sopir Truk Kepuharjo.

1) Struktur perekonomian Kalurahan Kepuharjo

Struktur perekonomian Kalurahan Kepuharjo terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor utama adalah sektor peternakan sapi perah dan sapi potong, pertanian dan perkebunan. Untuk sektor peternakan sapi perah didominasi dusun Kaliadem, Jambu dan Petung, dengan rincian tabel dan gambaran diagram sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Jenis Peternakan Kalurahan Kepuharjo

Jenis Ternak	Prakiraan Populasi
Sapi Perah	2.036
Sapi Potong	911
Kambing	848
Ayam Ras	52.000
Ayam Kampung	6.375
Bebek	561
Entok	328

Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Populasi ayam ras (52.000 ekor) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis ternak lainnya dalam tabel. Hal ini menunjukkan bahwa budidaya ayam ras mungkin menjadi salah satu sektor utama dalam industri peternakan di wilayah tersebut. Terdapat variasi yang cukup besar dalam jenis ternak yang dipelihara, mencakup sapi perah, sapi potong, kambing, ayam kampung, bebek, dan entok. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki beragam pilihan dalam usaha peternakan mereka. Meskipun populasi ayam ras mendominasi, masih ada potensi pengembangan untuk jenis ternak lainnya seperti sapi perah, sapi potong, kambing, dan bebek.

Upaya untuk diversifikasi ternak dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut. Populasi ayam kampung (6.375 ekor) menunjukkan bahwa meskipun ayam ras mendominasi, masih ada minat dan kebutuhan akan ayam kampung. Ini bisa menjadi peluang bagi peternak lokal untuk memasarkan produk-produk ternak tradisional dengan nilai tambah yang tinggi. Populasi sapi potong (911 ekor) juga cukup signifikan, menunjukkan adanya kebutuhan akan daging sapi dalam konsumsi masyarakat. Ini menunjukkan potensi untuk pengembangan peternakan sapi potong yang lebih besar di wilayah tersebut. Data ini memberikan gambaran tentang struktur peternakan dan potensi pengembangan sektor peternakan di wilayah tersebut, yang dapat menjadi dasar untuk perencanaan pengembangan peternakan yang berkelanjutan dan beragam

2) Keadaan Ekonomi Menurut Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 2. 9 Menurut Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

No	Padukuhan	Tingkat Kesejahteraan (Kk)				Keterangan
		Sejahtera	Pra Sejahtera 1	Pra Sejahtera 2	Miskin	
1	Kaliadem	15	54	32	32	133
2	Jambu	11	15	67	12	105
3	Petung	-	-	-	-	105
4	Kopeng	-	-	-	-	128
5	Batur	60	42	17	13	132
6	Pagerjurang	20	28	61	24	133
7	Kepuh	21	36	23	24	104
8	Manggong	12	34	25	17	80
Total		139	209	225	122	920

Sumber : Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam tingkat kesejahteraan di setiap padukuhan. Beberapa

padukuhan memiliki mayoritas rumah tangga yang dinyatakan sejahtera, sementara yang lain memiliki mayoritas rumah tangga dalam kategori pra sejahtera 1, pra sejahtera 2, atau miskin. Total rumah tangga terbagi cukup merata antara tingkat kesejahteraan, dengan sebagian besar 139 rumah tangga berada dalam kategori sejahtera, diikuti oleh pra sejahtera 2 (225 rumah tangga), pra sejahtera 1 (209 rumah tangga), dan miskin (122 rumah tangga). Beberapa padukuhan seperti Petung dan Kopeng tidak memiliki data mengenai tingkat kesejahteraan. Kehilangan data ini mengurangi kelengkapan informasi dan mempersulit analisis keseluruhan tentang kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Padukuhan Batur memiliki jumlah rumah tangga dalam kategori sejahtera tertinggi 60 rumah tangga, menunjukkan kemungkinan adanya potensi ekonomi yang cukup kuat atau keberhasilan program-program pembangunan di wilayah tersebut. Meskipun mayoritas padukuhan memiliki mayoritas rumah tangga dalam kategori sejahtera, ada juga jumlah yang cukup signifikan dari rumah tangga dalam kategori pra sejahtera 1, pra sejahtera 2, dan miskin. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

F. Sarana Dan Prasarana Kalurahan Kepuharjo

1. Fasilitas Kesehatan Kalurahan Kepuharjo

Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di Kalurahan Kepuharjo. Sarana dan prasarana ini mencakup fasilitas kesehatan seperti Puskesmas Pembantu dan Posyandu untuk balita dan lansia. Data ini memberikan gambaran tentang infrastruktur kesehatan yang

tersedia di setiap padukuhan, serta upaya pemerintah dalam memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Informasi ini menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengevaluasi keberhasilan program-program kesehatan, serta untuk merencanakan langkah-langkah yang lebih baik dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan di Kalurahan Kepuharjo.

Tabel 2. 10 Fasilitas Kesehatan Kalurahan Kepuharjo

No	NAMA PADUKUHAN	PUSKESMAS PEMBANTU	POSYANDU BALITA	POSYANDU LANSIA
1	Kaliadem	-	1	-
2	Jambu	-	1	1
3	Petung	-	1	-
4	Kopeng	-	1	1
5	Batur	-	1	-
6	Pagerjurang	1	1	-
7	Kepuh	-	1	1
8	Manggong	-	1	1
Jumlah		1	8	4

Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa, terlihat bahwa setiap padukuhan memiliki minimal satu Posyandu untuk balita dan lansia. Ini menunjukkan adanya upaya dalam memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan anak-anak dan lansia di setiap wilayah. Mayoritas padukuhan dari 8 memiliki Posyandu untuk balita, sedangkan untuk Posyandu lansia, hanya 4 padukuhan yang memiliki. Hal ini menunjukkan perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan anak-anak dibandingkan dengan lansia di wilayah tersebut. Sebagian besar padukuhan dari 8 hanya 1 padukuhan yang memiliki Puskesmas Pembantu, yang menunjukkan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan

kesehatan dasar di setiap wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di wilayah tersebut, terutama dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi lansia. Data ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, serta pentingnya evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan.

2. Fasilitas Peribadatan di Kalurahan Kepuharjo

Tabel 2. 11 Fasilitas Peribadatan di Kalurahan Kepuharjo

NO	PADUKUHAN	MASJID	MUSHOLA	JUMLAH
1	KALIADEM	1	-	1
2	JAMBU (Sampel DBKS)	1	1	2
3	PETUNG	1	1	2
4	KOPENG	1	-	1
5	BATUR (Sampel DBKS)	1	-	1
6	PAGERJURANG	2	2	4
7	KEPUH	1	-	1
8	MANGGONG	1	1	2
JUMLAH		9	5	14

Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir setiap padukuhan memiliki fasilitas keagamaan berupa masjid atau mushola. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat di setiap wilayah. Masjid lebih banyak ditemukan daripada mushola, dengan total 9 masjid dan 5 mushola di seluruh Kalurahan Kepuharjo. Hal ini mencerminkan

peran penting masjid dalam memenuhi kebutuhan ibadah umat Islam di wilayah tersebut. Padukuhan Pagerjurang memiliki jumlah fasilitas keagamaan tertinggi, dengan 2 masjid dan 2 mushola. Hal ini menunjukkan pentingnya peran padukuhan ini dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan bagi masyarakatnya. Terdapat variasi dalam ketersediaan fasilitas keagamaan di setiap padukuhan. Beberapa padukuhan memiliki kedua jenis fasilitas (masjid dan mushola), sementara yang lain hanya memiliki salah satu jenis fasilitas saja. Data ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung program-program pembangunan berbasis keagamaan, seperti perbaikan dan pembangunan fasilitas keagamaan yang lebih baik, serta penyediaan layanan keagamaan yang lebih luas untuk masyarakat Kalurahan Kepuharjo.

3. Fasilitas Pendidikan Kalurahan Kepuharjo

Pendidikan merupakan fondasi yang penting dalam persiapan peserta didik untuk masa depan, baik melalui bimbingan, pengajaran, maupun perannya di waktu yang akan datang. Hal ini memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan perekonomian khususnya. Tingkat pendidikan yang tinggi mendorong pertumbuhan keterampilan wirausaha, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja baru, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengasah pola pikir individu dan memfasilitasi penerimaan informasi yang lebih efektif.

Peran pendidikan dalam pembangunan sangat vital dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global dan menghadapi tantangan masa depan. Namun, perlu diakui bahwa di Kalurahan Kepuharjo masih terdapat berbagai masalah terkait dengan kualitas pendidikan, seperti mutu guru, fasilitas pendidikan, manajemen sekolah, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, program-program pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara bertahap. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kondisi pendidikan di Kalurahan Kepuharjo, tersedia tabel yang memperlihatkan gambaran umum mengenai hal tersebut sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Fasilitas Pendidikan Kalurahan Kepuharjo

No	Jenis Pendidikan	NEGERI			SWASTA		
		Gedung	Guru	Murid	Gedung	Guru	Murid
		Buah	Orang	Orang	Buah	Orang	Orang
1	TK	--	--	--	2	6	46
2	SD	2	13	280	--	--	--
3	SLTP	1	21	357	--	--	--
4	SMK	1	23	110	--	--	--
JUMLAH		6	57	747	2	6	46

Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendidikan negeri dan swasta di Kalurahan Kepuharjo dalam hal jumlah sekolah, fasilitas, jumlah guru, dan jumlah murid. Terdapat 6 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta di Kalurahan Kepuharjo. Sekolah negeri memiliki gedung

untuk semua jenjang pendidikan mulai dari TK hingga SMK, sedangkan sekolah swasta hanya memiliki gedung untuk TK. Sekolah negeri memiliki total 57 guru, sedangkan sekolah swasta hanya memiliki 6 guru. Sekolah negeri memiliki total 747 murid, sedangkan sekolah swasta hanya memiliki 46 murid. Kesimpulannya, pendidikan negeri memiliki cakupan yang lebih luas dan lebih banyak fasilitas dibandingkan dengan pendidikan swasta di Kalurahan Kepuharjo. Jumlah guru dan murid di sekolah negeri juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah swasta. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan negeri memiliki peran yang lebih dominan dalam menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat setempat.

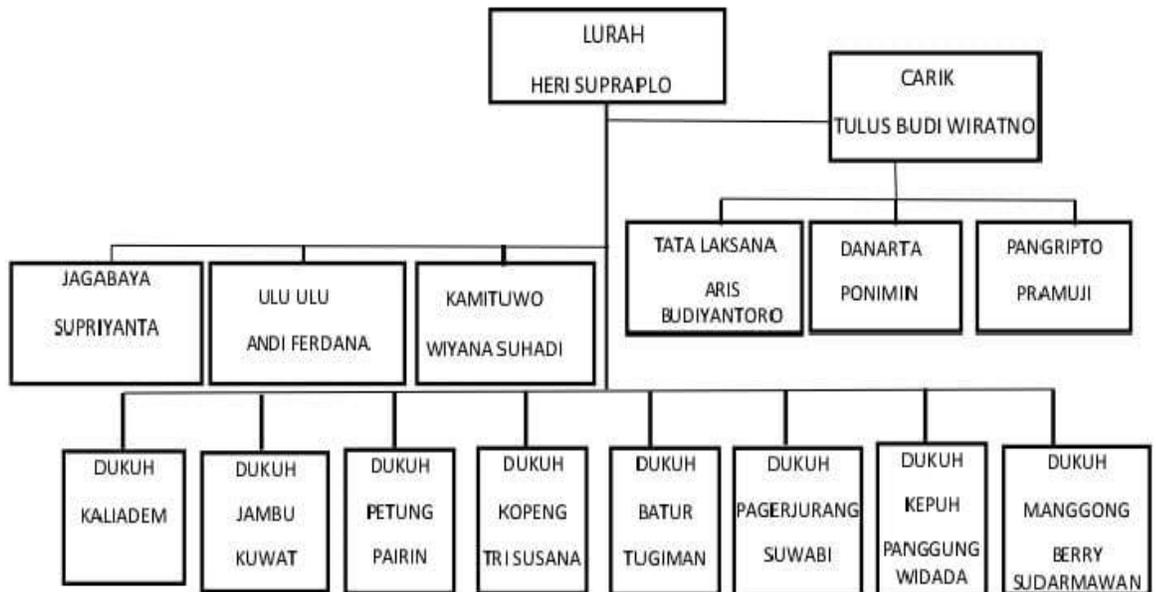
G. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Kepuharjo

Pemerintahan Desa Kepuharjo merupakan entitas administratif yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan di tingkat desa. Struktur organisasi pemerintahan desa ini menunjukkan bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab diatur untuk memastikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat setempat. Dalam mengelola urusan pemerintahan, desa Kepuharjo terdiri dari beberapa unit kerja yang saling terkait, mulai dari Lurah hingga berbagai lembaga yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu seperti Carik, Tata Laksana, Danarta, Pangripta, Jaga Baya, Ulu Ulu, Kamituwo, Dukuh.

Pada tabel struktur organisasi pemerintahan desa Kepuharjo berikut, akan disajikan susunan jabatan serta tanggung jawab masing-masing unit kerja di tingkat desa. Dengan memahami struktur ini, diharapkan masyarakat dapat

lebih memahami siapa yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pembangunan dan pelayanan di desa mereka, serta memudahkan dalam berinteraksi dengan pemerintah desa untuk kepentingan bersama. Berikut bagan struktur organisasi pemerintah kalurahan Kepuharjo :

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Kepuharjo



Sumber : Sumber : RPJMKal Kepuharjo 2021

Dalam Permendagri 84 Tahun 2015, Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari berbagai elemen dan unit kerja di tingkat desa yang terdiri dari Sekretariat Desa yang memiliki tugas dalam administrasi pemerintahan desa. Mempunyai fungsi yang mencakup tata usaha dan umum, keuangan,

perencanaan, dan membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi. Kepala Urusan memiliki fungsi dalam membantu Sekretaris Desa dalam pelayanan administrasi, terbagi menjadi tata usaha dan umum, keuangan, serta perencanaan. Pelaksana Teknis terdiri dari Kepala Seksi Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan, yang bertugas dalam urusan teknis di lapangan. Unsur Kewilayahan seperti Kepala Dusun atau sebutan lainnya, bertugas sebagai pembantu kepala desa di wilayah kerjanya dengan fungsi pembinaan, pengawasan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Struktur ini mencerminkan pembagian tugas yang terorganisir dengan baik untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan adanya fungsi yang jelas bagi setiap perangkat desa, diharapkan kinerja pemerintahan desa dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

H. APBKal Kalurahan Kepuharjo

Tabel 2. 13 APBKal Kalurahan Kepuharjo Tahun 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Asli Desa	441.000.000,00	
	Pendapatan Transfer	4.386.962.637,00	
	Pendapatan Lain-lain	501.518.063,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.329.480.700,00	
	BELANJA		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6.058.427.148,00	
	Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.527.133.000,00	
	Pembinaan Masyarakat Desa	351.737.961,00	
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.060.600.000,00	
	Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	301.551.849,00	
	JUMLAH BELANJA	10.299.429.958,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.969.949.258,00)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	4.969.949.258,00	
	SILPA Tahun Sebelumnya	4.969.949.258,00	
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	Penegeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	4.969.949.258,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumber : Data Diolah Dari APBKal Kalurahan Kepuharjo 2024

Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa total pendapatan Desa tersebut mencapai Rp 5.329.480.700,00. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 441.000.000,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp 4.386.962.637,00, dan Pendapatan Lain-lain sebesar Rp 501.518.063,00. Sementara itu, total belanja Desa mencapai Rp 10.299.429.958,00. Belanja tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan, seperti Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat

Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa. Dari perhitungan pendapatan dan belanja tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp 4.969.949.258,00, yang menunjukkan bahwa total belanja Desa melebihi total pendapatan yang diperoleh. Defisit ini kemudian ditutupi oleh penerimaan pembiayaan, dengan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dari tahun sebelumnya sebesar Rp 4.969.949.258,00. Dengan demikian, dari analisis tabel di atas, terlihat bahwa Desa tersebut memiliki defisit anggaran yang cukup besar, dan mereka menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran dari tahun sebelumnya untuk menutupi defisit tersebut.

I. Gambaran Potensi Objek Wisata Kalurahan Kepuharjo

Wilayah Kalurahan Kepuharjo terletak di sebelah selatan lereng Gunung Merapi dan berbatasan langsung dengan wilayah hutan. Tanah di wilayah ini gembur dan subur, serta kaya akan sumber daya alam berupa pasir dan batuan yang dimanfaatkan oleh warga dengan cara penambangan, baik secara manual maupun menggunakan alat berat dengan izin yang lengkap. Hasil tambang tersebut digunakan untuk keperluan pembangunan rumah dan lingkungan, serta dijual sebagai sumber mata pencaharian bagi warga Kalurahan Kepuharjo dan sekitarnya.

Di samping kegiatan penambangan, wilayah Kalurahan Kepuharjo juga memiliki tanah yang sangat subur. Hal ini mendukung pertumbuhan berbagai jenis tanaman, termasuk rumput untuk pakan ternak sapi, baik sapi perah maupun sapi pedaging. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam penyediaan ketahanan pangan, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat.

Selama pandemi seperti Covid-19, sektor pertanian menjadi andalan dalam mengatasi masalah ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dengan demikian, wilayah Kalurahan Kepuharjo memiliki potensi yang besar dalam sektor pertambangan dan pertanian, yang menjadi tulang punggung ekonomi dan keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Potensi tambahan lainnya adalah keberadaan kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kawasan hutan ini memiliki beragam jenis pepohonan yang tumbuh di dalamnya, yang memiliki peran penting sebagai penahan air hujan sehingga mampu mencegah terjadinya longsor. Pemerintah Kalurahan Kepuharjo beserta kelompok-kelompok kepemudaan di wilayah tersebut secara rutin dan sukarela melakukan kegiatan reboisasi di kawasan hutan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan alam hutan serta memastikan kelangsungan sumber air yang ada.

Kalurahan Kepuharjo memiliki beragam potensi objek wisata, seperti lava tour di sebelah utara padukuhan Kaliadem yang terkenal dengan "Wisata Bunker Kaliadem", serta lava tour di wilayah Padukuhan Jambu yang populer dengan "Wisata Batu Alien". Selain itu, terdapat obyek wisata lain seperti "Rumah Hobbit", "The Lost World", "Stone Hange", "Omahku Memoriku", "Rumah Mbah Lurah", dan Museum Mini. Saat ini, beberapa obyek wisata tersebut masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan di wilayah Kalurahan Kepuharjo.

Manajemen obyek wisata dengan profesional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri pariwisata secara menyeluruh. Hal ini

diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, memperluas dan meratakan lapangan kerja serta peluang berusaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mendukung perolehan Pendapatan Asli Kalurahan dan Daerah Kabupaten Sleman secara optimal, serta meningkatkan citra daerah di mata masyarakat di luar Kalurahan Kepuharjo. Objek wisata ini sering kali ramai dikunjungi, terutama pada hari biasa dan lebih lagi pada hari Minggu dan hari libur. Selain itu, panorama alam Gunung Merapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Objek wisata tersebut sebagai berikut :

Gambar 2. 2 Merapi Golf Gelanggang Wisata



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

Merapi Golf, yang didirikan pada tahun 1996, menghiasi lahan seluas 64 hektar yang dikelilingi oleh hutan di wilayah Kepuharjo. Merapi Golf, terletak di Yogyakarta, menawarkan pengalaman golf yang unik dengan latar belakang Gunung Merapi yang megah. Berlokasi di kawasan Kepuharjo, hanya sekitar 8 kilometer dari puncak Gunung Merapi, tempat ini tidak hanya menjadi tujuan golf yang mewah tetapi juga menawarkan pesona alam yang luar biasa.

Dikenal baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, Merapi Golf menawarkan kombinasi yang jarang terjadi olahraga golf yang menarik di tengah-tengah keindahan alam Cangkringan. Dengan pemandangan Gunung Merapi yang mengagumkan, para pemain golf dapat menikmati sensasi bermain di lapangan golf sambil merasakan kedamaian dan keindahan alam yang mengelilingi mereka.

Gambar 2. 3 Bangker Kaliadem



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

Bunker Kaliadem, yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada sekitar tahun 2000-an, awalnya berfungsi sebagai tempat perlindungan dari awan panas Gunung Merapi. Namun, pada tahun 2006, Gunung Merapi meletus dengan hebatnya. Material vulkanik yang meluncur dari gunung tersebut menimbun seluruh bangunan bunker Kaliadem.

Sejak kejadian itu, rencana untuk menjadikan bunker Kaliadem sebagai monumen dan museum alam mengemuka. Konsepnya adalah untuk memperingati erupsi besar Gunung Merapi dan menyajikan informasi tentang geologi serta dampak letusan gunung berapi secara lebih luas kepada

masyarakat. Dengan demikian, bunker Kaliadem diharapkan dapat menjadi pengingat akan kekuatan alam yang mengagumkan sekaligus memberikan pelajaran tentang pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.

Gambar 2. 4 Bukit Triangulasi



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

The Lost World Park adalah sebuah taman yang memesona yang terletak di lereng Gunung Merapi. Tempat ini memikat pengunjung dengan kecantikan yang tersembunyi, menampilkan lanskap yang sangat hijau dan kekayaan tanaman yang subur, termasuk beragam jenis bunga dan pepohonan cemara yang menawan. Berbagai kegiatan seru dapat dinikmati di sini, mulai dari piknik santai, flying fox, petualangan dengan jip, hingga sesi foto yang mengesankan. The Lost World Park menjadi destinasi sempurna bagi mereka yang ingin mendapatkan kedamaian dari alam. Selain itu, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan megah Gunung Merapi yang menjulang, menambah keindahan suasana alam yang ditawarkan tempat ini.

Gambar 2. 5 Stonehenge



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

Stonehenge Jogja bukanlah reruntuhan candi kuno, melainkan sebuah replika yang terdiri dari batu-batu raksasa yang disusun menyerupai kerangka pintu raksasa. Formasi ini dibuat dari batuan hasil erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Meskipun hanya merupakan replika, daya tariknya tidak kalah dengan situs aslinya di Inggris. Banyak wisatawan, baik lokal maupun internasional, yang datang berkunjung untuk menikmati keindahan alam di kaki Gunung Merapi sambil menikmati pemandangan Stonehenge.

Gambar 2. 6 The Lost World Castle



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

The Lost World Castle, terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo Cangkringan, menampilkan arsitektur yang unik menyerupai sebuah benteng. Namanya dipilih sebagai pengingat akan letusan dahsyat Gunung Merapi pada tahun 2010, yang menyebabkan beberapa desa di sekitarnya hancur. Sebagai respons terhadap kejadian tersebut, masyarakat dan pihak lainnya membangun tempat wisata ini sekitar 6 kilometer dari puncak gunung yang "hilang" akibat letusan. Fasilitas di tempat ini mencakup Gledekan, Tembok China The Lost World Castle, Spot Foto 3D, Kapal Black Pearl, dan 9D Cinema.

Gambar 2. 7 Batu alien



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

Tempat wisata alam Batu Alien Cangkringan menampilkan batu-batu besar yang tersisa dari letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Bentuk batu yang aneh, mirip dengan mata dan hidung, membuatnya disebut sebagai batu alien. Awalnya terbentuk oleh lahar panas, kini lokasi ini menjadi tempat populer untuk berfoto yang estetik sambil menikmati pemandangan megah dari Gunung Merapi.

Gambar 2. 8 Rumah hobbit



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

Rumah hobbit yang terletak di Dusun Jambu, Kepuharjo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, menawarkan pengalaman unik bagi pengunjung. Terletak di kaki Gunung Merapi, lokasinya memberikan udara yang sejuk, cocok untuk beristirahat dari rutinitas sehari-hari yang melelahkan. Bangunan-bangunan yang menyerupai rumah hobbit ini memiliki ukuran yang cukup besar, dengan tinggi sekitar 2 meter dan lebar sekitar 4 meter. Desainnya terlihat rapi dan teratur, membentuk sebuah taman dengan rumput hijau yang menyerupai karpet. Selain berfungsi sebagai spot foto yang populer, tempat ini juga menjadi tempat yang ideal untuk bersantai. Pengunjung dapat membawa alas atau tikar untuk duduk bersantai sembari menikmati pemandangan sekitar dan memakan bekal yang mereka bawa dari rumah. Dengan suasana yang tenang dan alam yang indah, Rumah Hobbit Kaliurang menjadi tempat yang sempurna untuk menghabiskan waktu santai dan mengisi pikiran dengan energi positif.

Gambar 2. 9 Musium Memori Omahku



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

Omahku Memoryku, sebuah rumah yang terletak di Dusun Petung, Desa Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, DI Yogyakarta, menarik perhatian dengan penampilannya yang tampak lapuk dan seolah-olah telah terbakar. Lokasinya, seperti yang terpampang di depan rumah, memiliki jarak terdekat dari pusat kawah Merapi, hanya sekitar 7 km. Masyarakat setempat membangun museum-mini di sekitar rumah ini untuk mengenang masa-masa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Salah satunya adalah Omah Memoriku, yang berisi peralatan dapur, alat elektronik, dan perkakas rumah tangga. Banyak dari barang-barang tersebut mengalami perubahan bentuk, kebanyakan berwarna abu-abu pucat akibat pasir dan debu Merapi yang menempel.

Gambar 2. 10 Museum Merapi Sisa Hartaku



Sumber : Data Kawasan Wisata Kalurahan Kepuharjo 2023

Museum Mini Sisa Hartaku, yang juga dikenal sebagai The House of Memory, adalah sebuah museum yang memajang peninggalan dari letusan Gunung Merapi pada tahun 2010. Terletak di Dusun Petung, Kepuharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, museum ini dulunya merupakan rumah pribadi milik Bapak Kimin sebelum kemudian diubah menjadi museum. Museum ini dirancang seperti sebuah rumah sehari-hari, dengan berbagai ruangan seperti dapur, kamar tidur, kamar mandi, dan ruang lainnya. Pengunjung dapat menemukan berbagai artefak termasuk tulang-tulang hewan korban letusan Gunung Merapi, perabotan rumah tangga yang selamat atau hancur akibat erupsi, foto-foto pascaerupsi dan korban, serta dokumentasi proses evakuasi. Desa Wisata Petung, tempat museum ini berada, menawarkan suasana alam yang alami yang cocok untuk kegiatan outbound dan berbagai aktivitas lainnya. Selain itu, desa ini memiliki potensi wisata lain seperti peternakan sapi perah yang memungkinkan pengunjung untuk belajar tentang proses pembuatan susu dan pemeliharaan sapi perah. Terdapat juga budidaya

umbi-umbian dan perkebunan kopi, khususnya kopi petung yang unik dan spesial. Jenis kopi yang ditanam meliputi Arabica dan Robusta, sementara pengunjung juga dapat belajar dan berpartisipasi langsung dalam proses perkebunan kopi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya tentang Governability pemanfaatan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengelolaan sumber daya alam di Kalurahan Kepuharjo dari awal terbentuk memang dari inisiatif dari masyarakat sendiri untuk mengelola potensi yang ada tanpa melibatkan pihak manapun dengan semangat gotongroyong dan jiwa membangun yang dimiliki masyarakat sehingga mampu membangun seperti sekarang ini bahkan tanpa melibatkan pihak manapun mereka membuktikan bahwa mereka bisa membangkitkan ekonomi lagi, dimana setelah terjadinya erupsi pada tahun 2010 yang mengakibatkan banyak kerusakan akibat abu vulkanik sehingga mengakibatkan ekonomi drop membuat masyarakat harus berpikir bagaimana membangun ekonomi lagi kedepannya penduduk Kepuharjo tidak menyerah mereka bangkit dengan menghadapi dampak buruk erupsi tersebut dan memulihkan wilayah mereka.

Otoritas dari Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam menjaga kelestarian sudah ada program yaitu memasang spanduk pengumuman dilarang berburu di hutan dipasang di tepi jalan, supaya menjaga ekosistem alam tetap terjaga. Dalam mengambil keputusan bersama Pemerintah Kalurahan mengadakan musyawarah terbuka dengan masyarakat setempat dilaksanakan

tiga bulan sekali supaya tidak ada tumpang tindih kedepannya, musyawarah juga dilakukan untuk membahas keberlanjutan pengelolaan sumber daya kedepannya agar bisa mensejahterakan masyarakat. Melihat dari awal terbentuknya pengelolaan sumber daya alam di Kepuharjo yang tidak melibatkan pihak manapun sedangkan pihak pemerintah desa baru berkolaborasi disaat semua sudah berjalan pemerintah tidak bisa melarang adanya pengelolaan sumber daya alam tersebut karena itu untuk masyarakat juga dan selagi tidak melanggar aturan meskipun belum ada izin dari Pemerintah Sleman.

faktor penghambat dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor objek wisata di Kalurahan Kepuharjo meliputi belum adanya izin dari Pemda Sleman, pembangunan objek wisata tanpa kolaborasi dengan pihak terkait, dan beberapa akses jalan yang rusak. Pemerintah desa perlu memproses izin ini untuk memastikan eksploitasi sumber daya alam dapat diatur, dipantau, dan dievaluasi secara sistematis, sehingga mencegah konflik dan memastikan kegiatan sesuai ketentuan. Sebaliknya, faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat yang kuat dalam mengembangkan potensi lokal, memungkinkan pengambilan keputusan yang inklusif dan transparan. Partisipasi ini membantu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, mengurangi konflik kepentingan, dan mempromosikan kesadaran serta pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan masa depan.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian data, fakta dan informan yang ditemukan peneliti maka sarannya sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan harus aktif terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan memberikan kapasitas yang memadai kepada masyarakat, menandakan bahwa Pemerintah Kalurahan memiliki tanggung jawab selaku pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Dalam hal ini kapasitas pemerintah Kalurahan bisa di tingkatkan lagi bukan hanya mengkoordinir dan mendukung tetapi terlibat secara nyata. Dengan keterlibatan yang kuat, maka mereka bisa menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang memadai dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tentu untuk mensejahterakan masyarakat lokal.

Dalam hal ini pemerintah harus meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dan bisa mengkoordinir lagi supaya seluruh masyarakat di Kepuharjo bisa merasakan dampak dari wisata baik dusun yang punya wisata ataupun yang tidak punya wisata, supaya bisa mensejahterakan seluruh masyarakat dengan adil dan rata. Pemerintah desa perlu mengeluarkan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk pengembangan objek wisata di kalurahan Kepuharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Roszaki, Abdul, dkk, 2005, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta: IRE Press.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal

Alam, A. S., & Prawitno, A. (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 93–104.

Amalia, T. (2017). Pengaruh Lingkungan Fisik Terhadap Tingkat Kunjungan Wisatawan Di Museum Daerah Sang Nila Utama Kota Pekanbaru. *Physics Education*, 23(4), 1–10.

Beda, P. D., & Supardal, S. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Srikeminut Di Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 174–182.
<https://doi.org/10.36355/jppd.v4i1.44>

Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20.
<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>

Fadilla, M., Nurmawati, E., Iqbal Fasa, M., & Suharto, S. (2022). Peran Sumber Daya

- Alam Bagi Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)*, 2(01), 54–63. <https://doi.org/10.54045/jeksyah.v2i01.70>
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hidayat, E. S., & Djadjuli, R. D. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 277–293. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3643>
- Kusumawati, B., & Nugroho, T. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelola Desa Wisata Gerbang Banyu Langit di Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. *TheJournalish: Social and Government*, 3(2), 88–94. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i2.256>
- Mardhika, J. G. (2023). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Potensi Lokal. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(1), 87–94. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3698>
- Musmulyadi, M., & Setyowati, Y. (2022). Governabilitas peran pemerintah desa Girikarto dalam pengembangan wisata Heha Ocean View. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 3(2), 117–134. <https://doi.org/10.47134/villages.v3i2.34>
- Okparizan, O., Sumaryana, A., Muhafidin, D., & Sugandi, Y. S. (2019). Kapasitas

Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Desa : Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan. *MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v8i1.773>

Prafitri, G. R., & Damayanti, M. (2016). Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas). *Jurnal Pengembangan Kota*, 4(1), 76. <https://doi.org/10.14710/jpk.4.1.76-86>

Setiawan, A., Wulandari, W., & Munawaroh, S. (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Cimanggu Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 15–27. <https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.1814>

Wardani, A. K., & Riyadi, S. (2020). Analisis Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengembangan Obyek Wisata Budaya di Kabuapetn Ciamis. *Jurnal Moderat*, 6(November), 792–799.

Wirakusumah, G., Naukoko, A., & Tumangkeng, S. (2023). Potensi Objek Wisata Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara (Studi pada Hutan Mangrove Budo). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(10), 37–48.

Skripsi

Simplisius Alberto Padji, (2022). Governabilitas Pemerintah Kalurahan Dalam Mengelola Sumber Daya Alam (studi kasus di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). (Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”)

Leonal Paskal, (2024). Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Objek Wisata (studi kasus di Desa Kebong, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat). (Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pemabngunan Masyarakat Desa “APMD”)

Nessi Marceta, (2022). Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Pemanfaatan Objek Wisata Tebing Breksi (studi kasus di Kalurahan Sambireje, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta). (Skripsi Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”)

Sumber website

<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/wilayah> Diakses Tanggal 19 April 2024

<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/keompok-umur> Diakses Tanggal 19 April 2024

<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/pendidikan-dalam-kk> Diakses Tanggal 19 April 2024

<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/pekerjaan> Diakses Tanggal 19 April 2024

<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first/statistik/agama> Diakses Tanggal 19 April 2024

<https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first>

Undang-undang

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2014 Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasioanal Gunung Merapi

- Peraturan Gubernur rt/rw pasal 12 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031
- Undang-undang pasal 33 ayat 3 Tahun 1945 Mengatur Hak Warga Negara Dalam Menikmati Kekayaan Alam

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Governability Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan
Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Identitas Informan

Nama :

Umur :

Jenis kelamin :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Pertanyaan untuk Bapak Lurah, Perangkat Desa, BPD, PKK, Karang Taruna,
Masyarakat Desa Kepuharjo, Pokdarwis, dan Ketua Gapoktan di Kalurahan Kepuharjo,
Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman.

A. Kapasitas Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mengelola Sumber Daya Alam

1. Bagaimana kapasitas pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sumber daya alam agar bisa mensejahterakan masyarakat ?
2. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Kepuharjo saat ini, sejauh mana kolaborasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah dan masyarakat ?

3. Bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam pengambilan keputusan bersama terkait pengelolaan sumber daya alam Kepuharjo ?
4. Apa saja kapasitas dari pemerintah desa dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam ?
5. Bagaimana peran dari setiap stekholder seperti pemerintah, masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya alam sehingga menjadi objek wisata seperti sekarang ?

B. Otoritas Pemerintah Kalurahan Kepuharjo dalam mengelola sumber daya alam

1. Apakah pemerintah desa sudah menetapkan peraturan, pedoman dan mekanisme yang tepat untuk pengelolaan, penggunaan dan konservasi sumber daya alam serta memastikan pelaksanaannya ?
2. Apakah pemerintah desa sudah memenuhi tanggung jawabnya terkait kewenangan yang sudah ada ?
3. Apakah kewenangan yang dibuat sudah di patuhi masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam

C. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemanfaatan sumber daya alam pada sektor objek wisata di Kalurahan Kepuharjo

1. Apakah tindakan masyarakat kepuharjo dalam mendukung adanya pengelolaan sumber daya alam untuk membangun objek wisata ?
2. Apakah akses di desa sudah mendukung dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam, supaya memudahkan para wisata yang datang ?
3. Apa strategi pemerintah desa setempat dalam mendukung dengan adanya pengelolaan potensi sumber daya alam di Kepuharjo ?

4. Apakah sudah ada forum atau pertemuan antara pemerintah dan masyarakat lokal untuk membahas perkembangan, dan peluang dengan adanya sektor objek wisata ini ?
5. Apakah setelah adanya sektor objek wisata ini sudah membantu ekonomi masyarakat?
6. Mengapa pemerintah DIY tidak mengizinkan adanya pembangunan sektor objek wisata di Kepuharjo ?
7. Mengapa sejauh ini masyarakat di Kepuharjo tidak semua merasakan dampak dari hasil sektor objek wisata tersebut ?
8. Apakah pemerintah desa sudah menampung aspirasi masyarakat terkait belum menerima izin dari pemerintah DIY ?
9. Apakah terdapat peningkatan peluang pekerjaan lokal dengan adanya sektor objek wisata di merapi ?
10. Bagaimana dampak bagi masyarakat jika sewaktu-waktu merapi terjadi erupsi, karena berada pada rawan bencana ?

DAFTAR OBSERVASI

No	Uraian pengamatan	Ada	Tidak	Keterangan
1	Kantor Kalurahan	✓		Kondisi Kantor Kalurahan Bagus Berada Dusun Pagerjuang, Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman Yogyakarta
2	Struktur Organisasi Desa	✓		Ada
3	RPJMkal	✓		Peraturan Kalurahan Kepuharjo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2021-2026
4	APBKal	✓		Peraturan Lurah Kepuharjo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Condongcatur Tahun 2024
5	Website Kalurahan	✓		https://kepuharjosid.slemankab.go.id/first

BUKTI DOKUMETASI WAWANCARA INFORMAN



Wawancara bersama Pak Lurah Heri Suprpto



Wawancara bersama Pak carik Tulus Budi Wiranto



Wawancara bersama Pokdarwis pak Wiyana Suhadi



Wawancara bersama Ketua kelompok tani pak Warjana



Wawancara bersama Masyarakat mas
Wibowo



Wawancara bersama Mas anjar Karang
Taruna



Wawancara bersama Ibu Sri Sayuti PKK



Wawancara bersama Bersama BPD pak
Sumijo

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561974, 550775, Fax. (0274) 515989 - Yogyakarta 55225

Nomor : 131/PEMJJ/X/2023

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"
di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Yohana Ayu Rosari
No. Mahasiswa : 20520037
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul : 19 Oktober 2023
Judul : Governability Pemerintah Desa dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemanfaatan SDA di
Kalurahan Kepuharjo.

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



SURAT PERMOHONAN IJIN PENELITIAN



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

PROG. PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA IGA STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI B
Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225. Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

Nomor : 159/II/J/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan pada tanggal 19 Februari 2024. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Yohana Ayu Rosari
No Mhs : 20520037
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Tempat : Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Dra. B.Hari Sapataning Tyas, M.Si

Schubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaannya untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Ketua
Dr. Sumo Eko Yunanto
Telp. 170 230 190

TGL 27 - 02. 2024
04/KP/L/2024
MENGETAHUI
RAHAN KEPUHARJO
BUDI WIKATNO
96807092009051002

SURAT TUGAS



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PROGRAM STUDI PEMANGUNAN MASYARAKAT DESA PROGRAM DIPLOMA TIGA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI PEMBANGUNAN SOSIAL PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B

• PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI B
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM SARJANA STATUS TERAKREDITASI A
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PROGRAM MAGISTER STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI

Alamat : Jalan Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 079/I/T/2023

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Yohana Ayu Rosari
Nomor Mahasiswa : 20520037
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Kepuharjo, Kapanewon Cangkringan,
Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Governability Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan
Sumber Daya Alam di Kalurahan Kepuharjo,
Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman
c. Waktu : 19 Februari 2024

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 12 Februari 2024
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.